



BULETIN VIRA JATI

MEDIA KOMUNIKASI ONLINE SESKOAD

Edisi XVIII MARET 2022

SESKOAD

Terbaik, Terhormat dan Disegani



GRHA WIYATA YUDDHA

SESKOAD

Menyiapkan Pamen TNI AD sebagai
Komandan dan Staf Perang



ISSN 2086-9312



PRAKATA

BULETIN VIRAJATI

Syukur Alhamdulillah, Buletin Virajati Seskoad Online edisi ke - 18 bulan Maret 2022 kembali hadir dihadapan para pembaca dengan menyajikan berbagai informasi pilihan menarik dan bermanfaat. .

Pada kesempatan edisi kali ini, Buletin Virajati Seskoad mengangkat tajuk "**Seskoad Menyiapkan Pamen TNI AD sebagai Komandan dan Staf Perang**". Tema ini diangkat bertepatan dengan dibukanya Pendidikan Reguler (Dikreg) LXII Seskoad TA. 2022 di Gedung Gatot Soebroto, Seskoad Bandung, Kamis, (17/3/2022). Selama 7 bulan, sebanyak 268 para Perwira Siswa (Pasis) Seskoad akan belajar tentang ilmu perang, dididik, dilatih dan disiapkan untuk menjadi Komandan dan Staf perang, yang mahir dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan operasi matra darat dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain mengulas materi utama, dalam buletin edisi kali ini juga menyajikan sejumlah tulisan penting dan menarik, yakni Quo Vadis Implementasi Pembinaan Teritorial TNI AD di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0, Implementasi "*Dual Use*" Bekang TNI AD dalam Menghadapi Ancaman Aktual, Komponen Cadangan sebagai Tentara Kontrak dalam Sistem Pertahanan Negara Rusia, Sinergi antara Militer dan Sipil Negara Ukraina dalam Sistem Pertahanan Guna Menangkal Ancaman dari Luar Negeri serta sejumlah tulisan menarik yang berkaitan dengan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Negara di berbagai belahan negara di dunia.

Kami berharap berbagai tulisan yang disajikan bermanfaat bagi prajurit TNI AD dan kalangan masyarakat luas, menjadi bacaan literasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan guna memberikan sumbangsih untuk masyarakat, bangsa dan negara. Demi peningkatan kualitas Buletin Seskoad kedepan, saran masukan pembaca kami nantikan.

Redaksi

Pelindung

Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, MA.

Pembina

Brigjen TNI Refrizal

Penasehat

Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M.

Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Drs. Paiman

Wakil Pimpinan Redaksi

Kolonel Inf Roy H.J. Sinaga, S.Sos

Redaktur Pelaksana

Kolonel Inf Jemz Andre Ratu Edo, S. Sos.

Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si.

Sekretaris Redaksi

Mayor Arm Nicolas Da Silva S.Sos., M.Si.

Staf Redaksi

Mayor Kav Barid Budi Susila, S.Sos.

Mayor Inf Gede Agus Dian P., S.Sos., MMDS.

Letda Chb R. Caturino

PNS Apep Saripudin

Reporter

Letda Inf Asmadi

Sertu Susilo

Fotografer

Serma Winarna

Desain Grafis

Sertu Faizal Ridho Ilhami

PNS Rendra Boyke, S.Pd., M.Pd.

Alamat Redaksi

Seskoad, Jl. Jend Gatot Subroto 96 Bdg.

Alamat Email

buletinvirajati@gmail.com

Website

<https://www.seskoad.mil.id>

Facebook

<http://www.facebook.com/buletinvirajati>

Instagram

<http://www.instagram.com/buletinvirajati>

Disclaimer :

- Semua hasil karya yang dimuat dalam "Jurnal Virajati" adalah menjadi hak cipta <http://www.seskoad.mil.id>.
- Tulisan dalam "Jurnal Virajati" merupakan buah pemikiran dan menjadi tanggung jawab penulis, serta tidak merepresentasikan pandangan organisasi Seskoad.
- Ide dan gagasan berbentuk tulisan essay dapat disampaikan kepada redaksi melalui email Redaksi

SESKOAD

**Menyiapkan Pamen TNI AD sebagai
Komandan dan Staf Perang**



DAFTAR ISI

SESKOAD MENYIAPKAN PERWIRA MENENGAH TNI AD
SEBAGAI KOMANDAN DAN STAF PERANG
TIM REDAKSI BULETIN SESKOAD

5

32

PERAN PEMERINTAH KAZAKHSTAN DALAM
PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN GUNA
MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA
MAYOR LAUT (E) KHARIS NASUTION, S.E., CTMP

QUO VADIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN
TERITORIAL TNI AD DI ERA INDUSTRI 4.0
DAN MASYARAKAT 5.0
KOLONEL KAV SUTEJA, S.H., M.SI.

10

38

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI
KOMPONEN CADANGAN KONGO GUNA MEREDAM
KONFLIK NEGARANYA
MAYOR PAS AGUS M. ARIF H. A.

IMPLEMENTASI "DUAL USE" BEKANG TNI AD DALAM
MENGHADAPI ANCAMAAN AKTUAL
MAYOR CBA I KETUT ARSANA PUTRA, S.T., M.Sc

14

43

SISTEM PERTAHANAN NEGARA ARAB SAUDI
DALAM MENGHADAPI ANCAMAAN DARI DALAM
MAUPUN LUAR NEGERI
MAYOR CPL ADI YUSUP KESUMA JAYA, B.Sc.

KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI TENTARA
KONTRAK DALAM SISTEM PERTAHANAN
NEGARA RUSIA
MAYOR INF ABDUL RIZKA FITRAWAN, S.I.P.

19

49

BENTUK SINERGISITAS ANTARA MILITER-SIPIL
NEGARA JERMAN DALAM PERTAHANAN NEGARA
MAYOR KAV SAPTA RAHARJA, S.I.P.

SINERGI ANTARA MILITER DAN SIPIL NEGARA
UKRAINA DALAM SISTEM PERTAHANAN GUNA
MENANGKAL ANCAMAAN DARI LUAR NEGERI
MAYOR INF HADI MUSTOFA, S.AG., M.M.

26

54

PERTEMPURAN CARACAS : KAJIAN
PERTEMPURAN KEMERDEKAAN VENEZUELA
KOMPOL A. MUKTI SURYA A. S., S.H., S.I.K., M.SI.



“MENJADI PERWIRA JANGAN TAKUT UNTUK JATUH/GAGAL”

**- Setiap kegagalan jadikan sebagai pendewasaan
para Perwira untuk menjadi Perwira yang lebih baik -**

Kasad - Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E. M.M.

- Seskoad, 21 Maret 2022-



SESKOAD MENYIAPKAN PERWIRA MENENGAH TNI AD SEBAGAI KOMANDAN DAN STAF PERANG

TIM REDAKSI BULETIN SESKOAD

Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Seskoad menyiapkan Pamen TNI AD sebagai Komandan dan Staf Perang. Di Seskoad, Perwira Siswa (Pasis) akan belajar perang, dididik, dilatih dan disiapkan untuk menjadi Komandan dan Staf perang, yang mahir dalam merencanakan, menyiapkan, melaksanakan dan mengendalikan operasi matra darat dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Seskoad para Pasis mempelajari berbagai materi, guna mendukung keberhasilan tugas pokoknya dikemudian hari sebagai Komandan dan Staf Perang, antara lain: Teori dan Sejarah Perang, Manajemen Perang, OMP dan OMSP, Taktik dan Strategi Brigif dan Divisi, Studi Kewilayah, Latihan Posko, Operasi Gabungan dan Kepemimpinan Militer.

Demikian disampaikan Komandan Sekolah Komando dan Staf Angkatan Darat (Seskoad) Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., ketika memberikan pengarahan kepada Pasis Dikreg LXII, usai membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LXII Seskoad TA. 2022 dengan

menerapkan protokol kesehatan bertempat di Gedung Gatot Soebroto, Seskoad Bandung, Kamis, (17/3/2022). Dikreg ke-62 Seskoad yang akan berlangsung selama 7 bulan (28 minggu) ini diikuti oleh 268 Pasis , yang terdiri dari 235 Pasis TNI AD, 2 Pasis TNI AL, 2 Pasis TNI AU, 19 Pasis POLRI dan 10 Pasis Negara Sahabat yaitu masing-masing dari Australia, Malaysia, Thailand, Philipina, India, Arab Saudi, Pakistan, Singapura, Bangladesh dan Fiji.

Sementara, pada amanat upacara pembukaan Dikreg, Komandan Seskoad mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan hasil didik yang semakin berkualitas, Seskoad telah menerapkan sistem pembelajaran baru Adult Learning System atau sistem belajar dewasa serta mengimplementasikan melalui metode belajar berbasis *Student Learning Center* atau belajar terpusat kepada Perwira Siswa.

“Metode belajar tersebut didukung dengan budaya membaca, budaya diskusi, budaya menulis dan budaya komunikasi, sehingga Pasis diharapkan fokus pada olah pikir dengan analisa yang kritis dan dihasilkan produk yang kreatif

dan inovatif", ujar Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A.



Danseskoad, Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LXII Seskoad TA. 2022

Dalam kesempatan tersebut, Danseskoad juga menegaskan bahwa sebagai *Center Of Excellence*, Seskoad adalah lembaga pendidikan umum tertinggi di lingkungan TNI AD sekaligus melaksanakan pengkajian strategis dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Salah satu implementasi transformasi TNI AD, menurutnya adalah melalui pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya prajurit. Pendidikan Reguler Seskoad dilakukan secara terus menerus sebagai upaya peningkatan kualitas keluaran perwira dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompetitif.

"Dengan tujuan mengembangkan kemampuan perwira siswa yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, pengetahuan dan Keterampilan meliputi kecabangan pemimpin dan staf pada tataran taktis dan operasional serta memiliki jasmani yang samapta", tegas Lulusan US Army War College tahun 2015 dan Lemhannas RI tahun 2018.

Adapun sasaran yang ingin dicapai, menurut Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho adalah Tri Pola Dasar yang meliputi Bidang Sikap dan Perilaku, Bidang Pengetahuan dan Keterampilan sesuai dengan kecabangannya masing-masing, serta Bidang Jasmani dengan lama pendidikan 28 minggu yang terdiri dari tahap I selama 4 minggu untuk materi Kecabangan dan tahap II selama 24 minggu untuk materi Komando dan Staf.

Usai pembukaan Dikreg LXII, Komandan Seskoad dengan didampingi para pejabat struktural Seskoad memberikan Jam Komandan kepada seluruh Pasis Dikreg LXII. Dalam arahannya, Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A., antara lain menyampaikan tentang Sistem Pembelajaran dan Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan Seskoad dalam kondisi pandemi Covid-19 serta ulasan tentang kondisi dunia Perang dan Damai mulai Perang Dunia I, Perang Dunia II, Perang Kemerdekaan di Indonesia, Perang Dingin, Perang Modern, Perang Rusia VS Ukraina dan Perang Masa Depan.

Sistem Pembelajaran di Seskoad.

Pertama, Sistem Belajar Dewasa (*Adult Learning System*). *Adult Learning* atau Andragogi adalah suatu model proses pembelajaran peserta didik yang terdiri atas orang dewasa. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan orang dewasa dalam pembelajaran. Proses pembelajaran dapat terjadi dengan baik apabila metode dan teknik pembelajaran melibatkan peserta didik.

Malcolm Knowles (1986), menyebutkan prinsip pembelajaran orang dewasa, yakni : a. Orang dewasa perlu terlibat dalam merancang dan membuat tujuan pembelajaran. Mereka mesti memahami sejauh mana pencapaian hasilnya. b. Pengalaman adalah asas aktivitas pembelajaran. Menjadi tanggung jawab peserta didik menerima pengalaman sebagai suatu yang bermakna. c. Orang dewasa lebih berminat mempelajari perkara-perkara yang berkaitan secara langsung dengan kerja dan kehidupan mereka, dan; d. Pembelajaran lebih tertumpu pada masalah dan membutuhkan dorongan dan motivasi.

Dalam sistem belajar dewasa, siswa bukanlah suatu 'wadah' yang kosong, melainkan 'wadah' yang sudah terisi, dan memerlukan tambahan 'air' (ilmu) untuk memenuhinya. Menyadari hal ini, Seskoad mengimplementasikan sistem belajar dewasa dalam operasional pendidikannya. Sistem ini mengedepankan pembelajaran secara mandiri dan independen, mewadahi model instruksi dan strategi yang memfokuskan pada siswa sebagai partisipan aktif, memfasilitasi

kolaborasi kelompok dan usaha kolektif, serta mengedukasi siswa untuk aktif meng-explorasi pengetahuan untuk keperluan dirinya sendiri. Dosen dalam proses belajar mengajar (PBM) berperan sebagai guru, pembimbing, mentor, konsuler, dan fasilitator.

Hakikat sistem belajar dewasa adalah proses belajar untuk menjadi diri sendiri, bukan proses pembentukan menurut kehendak orang lain. Dalam penerapannya, Seskoad memberikan inisiatif penuh kepada Perwira Siswa untuk aktif mencari wawasan baru yang dibutuhkannya. Perwira Siswa menentukan frekuensi belajarnya sendiri agar memicu timbulnya motivasi dan ‘rasa memiliki’ atas pelajarannya sendiri. Jadwal pelajaran diatur sedemikian rupa sehingga Perwira Siswa masih mempunyai waktu luang untuk pengembangan dirinya. Materi diskusi kelompok ditambah waktunya, agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikannya guna menciptakan pengetahuan baru. Dosen dalam diskusi ini, memiliki peran sebagai narasumber, pengajar, mediator, fasilitator, dan negosiator yang menjembatani, membatasi, serta mengarahkan para Perwira Siswa agar proses berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan di dalam kurikulum.

Kedua, Budaya Membaca. Menurut Rozin (2008), budaya membaca adalah kegiatan positif rutin yang baik dilakukan untuk melatih otak untuk menyerap segala informasi yang terbaik diterima seseorang dalam kondisi dan waktu tertentu. Sumber bacaan bisa diperoleh dari buku, surat kabar, tabloid, internet, dan sebagainya. Buku adalah jendela dunia, membaca adalah kunci untuk membuka ‘jendela’ dan melihat luasnya dunia, tanpa membaca, dunia terasa menjadi sempit. Membaca dalam pendidikan militer menjadi kebutuhan pokok untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena ilmu militer bukanlah ilmu pasti (*exact*), namun lebih mengarah kepada social science yang dinamis. Untuk menghadapi ilmu yang dinamis ini, dibutuhkan analisis dari berbagai referensi, teori, ataupun sudut pandang.

Oleh karenanya, Seskoad menanamkan budaya membaca kepada siswa agar dapat memenuhi tuntutan intelektual, mengetahui hal-hal aktual, menstimulasi daya imajinatif, serta meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis serta kreatif.



Jam Danseskoad, Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS., M.A. setelah membuka Pendidikan Reguler (Dikreg) LXII Seskoad TA. 2022

Dalam implementasinya, Seskoad menstimulasi budaya membaca dengan cara diskusi kelompok menggunakan term of reference (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) yang berisi rumusan masalah, persoalan dan sumber referensi yang harus dibaca. TOR/KAK diberikan minimal tiga hari sebelum materi pelajaran diberikan, sehingga siswa memiliki waktu untuk membaca, baik referensi wajib ataupun referensi tambahan. Modal bacaan ini berguna untuk menjawab persoalan-persoalan, dan mendukung pelaksanaan diskusi didalam kelas. Diskusi menjadi wahana bagi siswa untuk mengeluarkan pendapat, berbagi ilmu dan pengalaman (*sharing knowledge*), mengkaji relevansi doktrin, dan beradu argumentasi menggunakan referensi yang telah dibaca serta aspek empirik masing-masing. Pelaksanaan diskusi ini dapat mengukur apakah siswa membaca atau tidak, karena pada saat diskusi, masing-masing siswa akan ditanya oleh dosen/Patun yang berperan sebagai moderator, serta pada satu jam pelajaran (JP) terakhir dalam diskusi akan dilaksanakan evaluasi. Pertanyaan evaluasi ini langsung dipilih oleh Direktur Pendidikan Seskoad, dimasukkan kedalam *server* terpusat untuk ditampilkan pada proyektor yang ada di kelas.

masing-masing, sehingga mau tidak mau siswa harus membaca agar dapat berkontribusi pada diskusi dan menjawab evaluasi di akhir pelajaran. Diharapkan dengan langkah ini dapat menstimulasi daya ingat siswa, memperoleh insight terhadap ‘bias’ yang ada, dan menambah kedewasaan berpikir.

Ketiga, Budaya Menulis. Menulis dan membaca adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena penulis yang baik bisa dikatakan adalah pembaca yang baik. Menulis melatih keterampilan siswa dalam berpikir, berkomunikasi, berargumentasi dan meng-ekspresikan ide dan gagasannya. Dari tulisan yang dibuat, dapat diukur bagaimana kemampuan intelektualnya, pemahaman materinya dan kualitas hasil belajarnya.

Menanamkan budaya menulis adalah hal yang krusial bagi siswa sebagai calon pemimpin dan staf militer. Karena perwira harus dapat mengkaji, menganalisa, dan menyarankan kepada pimpinan ataupun organisasi dalam bentuk tulisan secara efektif. Dalam implementasinya, Seskoad menerapkan budaya menulis dengan memberikan penugasan Taskap dan esai kepada siswa.

Taskap merupakan produk penelitian siswa yang disusun mulai awal hingga akhir pendidikan. Sedangkan tugas esai diberikan secara rutin setiap bulannya. Tema esai disesuaikan dengan TOR/KAK sesuai materi pelajaran, dan diketik dengan komputer sebanyak sepuluh halaman. Perwira Siswa diberikan persoalan didalam TOR/KAK berupa kasus atau masalah yang ada di beberapa negara di dunia. Masing-masing Perwira Siswa meneliti secara mandiri (*individual research*), menganalisa, dan menuliskan hasil perbandingan dalam bentuk tulisan. Siswa dilatih untuk dapat mengambil *lesson learned* dari topik tersebut, dan menuangkan gagasannya secara mengalir, logis dengan berlandaskan pada teori dan referensi. Hasil penulisan akan dipaparkan dihadapan rekannya, sehingga terjadi sharing *knowledge* yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan secara terintegrasi. Selain itu, dengan budaya menulis ini, siswa dilatih untuk terbiasa mengetik sepuluh jari, dan mampu mengoperasionalkan komputer khususnya

aplikasi pokok seperti *microsoft word*, *excel* dan *power point*, guna efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan tulisan ilmiah.

Diharapkan dengan ditanamkan budaya membaca dan menulis di pendidikan Seskoad, pemimpin dan staf militer ke depan memiliki ‘hobi’ membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi sumber ide, inspirasi dan gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi TNI AD.

Keempat, Kritis dan Kreatif. Seskoad membekali aspek intelektual dan karakter secara proporsional. Dengan menyadari bahwa militansi sebagai keunggulan dari karakter TNI AD, Seskoad meningkatkan militansi tidak hanya difokuskan pada aspek afektif, namun juga pada aspek kognitif atau intelektual.

Militansi kognitif dapat diilustrasikan dengan Perwira Siswa yang *addictive* (*candu*) terhadap suatu disiplin ilmu, selalu merasa ‘haus’ ilmu, kritis untuk mengevaluasi dan menganalisa masalah, tidak berhenti mencari solusi-solusi masalah dari tinjauan berbagai literasi. Untuk menumbuhkan spesifikasi ini, Seskoad menstimulus daya analisis (*thinking about thinking*) Perwira Siswa melalui penerapan persoalan analisis, argumentatif, dan komparasi studi kasus. Seskoad menyusun rubrik jawaban yang tidak kaku, namun bersifat fleksibel ditinjau dari hasil analisis, dan esensi jawaban berlandaskan berbagai literasi.

Kelima, Aplikasi teknis militer. Sebagai calon pemimpin dan staf militer, lulusan Seskoad harus mampu berperan sebagai Komandan Latihan. Komandan latihan yang profesional harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan latihan secara mandiri.

Oleh karenanya, Seskoad menugaskan siswanya untuk mampu menyusun produk latihan seperti rencana garis besar (RGB) dan naskah latihan baik buku I, IIA, IIB, dan III, secara perorangan.

Masing-masing individu harus memahami bagaimana cara menyusun skenario latihan dimulai dari setting strategis hingga taktis secara kronologi, rasional dan relevan, serta mampu merancang asumsi waktu yang tepat dan dapat dioperasionalkan pada pelaksanaan Latihan Posko I.

Dosen pengampu materi akan meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan pengasuhan khusus secara rutin bagi siswa yang memiliki kendala dalam penyusunan naskah latihan. Validitas dan relevansi produk yang telah disusun akan diuji dan dipaparkan oleh siswa dihadapan dosen secara orang per orang. Produk terbaik akan dijadikan sebagai pedoman dan dioperasionalkan pada Latihan Posko I.

Produk terbaik juga akan berpengaruh pada penentuan jabatan pada Latihan Posko I, dimana jabatan penyelenggara atau pelaku seperti Komandan Latihan dan Pangkogasgab dipilih berdasarkan indeks nilai tertinggi pada penyusunan RGB dan naskah latihan. Dengan metode ini, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk menyusun produk latihan secara serius yang bermanfaat bagi penugasannya sebagai komandan latihan ke depan.

Keenam, Sistem Evaluasi dan Transparansi

Nilai. Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui penyempurnaan sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang baik dapat menjadi indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan yang ditetapkan di dalam kurikulum, serta mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai.

Untuk mengetahui validitas dari indikator ini maka perlu dibangun sistem ujian yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan evaluasi, Seskoad menyusun model evaluasi yang sistematis. Pemilihan soal dalam evaluasi dibuat oleh dosen pengampu materi dengan tiga alternatif soal. Soal yang akan keluar dipilih langsung oleh Direktur Pendidikan, tiga puluh menit sebelum ujian dimulai, yang kemudian ditampilkan di proyektor kelas masing-masing.

Lembar ujian dikirim ke bagian analisa dan evaluasi pendidikan (Anevdi) untuk di barcode, dipisahkan antara lembar biodata dan jawaban, sehingga korektor mengevaluasi tanpa mengetahui siapa pemilik lembar ujian tersebut. Setelah selesai dikoreksi, lembar ujian dikembalikan kepada siswa lengkap dengan rubrik komentar dari korektor agar siswa mengetahui apa keunggulan dan kekurangan dari pendapatnya.

Dalam pendistribusian hasil ujian, nilai perorangan siswa akan dikirimkan melalui email dan hanya untuk keperluan pribadi siswa, sehingga dapat memelihara moril, dan menstimulasi siswa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri tanpa berkonflik dengan yang lain.

Ketujuh, Comprehensive Learning Management System. Seskoad pada Dikreg ke LXII tahun anggaran 2022 mulai menerapkan **Learning Management System (LMS)** yang memiliki fitur kelas virtual interaktif dan aktivitas digital untuk mendukung pembelajaran mandiri maupun kolaborasi kelompok. LMS didesain untuk memfasilitasi, memonitor dan menilai aktivitas belajar Siswa.

Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi desktop ataupun mobile phone sehingga tidak membatasi ruang dan waktu dari proses pembelajaran. Fitur yang disediakan dalam LMS ini diantaranya kelas virtual, perpustakaan (*e-library*), aktivitas, nilai, dan plagiat detektor. Dengan fitur-fitur ini membuka peluang bagi dosen untuk mendistribusikan paket instruksi, mengajar, memberikan *feedback* dan menilai aktivitas siswa. Begitu pula siswa dapat mengakses paket instruksi, diskusi, dan ujian dengan mudah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan metode ‘tatap muka’ dengan metode fleksibel menggunakan pendekatan *web-based (online)*, serta sinkronisasi dan asinkronisasi secara ekstensif diantara peserta didik dan tenaga pendidik pada lokasi yang berbeda, atau terpisah secara geografis dengan zona waktu yang berbeda. Saat ini LMS sudah dieksekusi dengan dipasangnya *access point* di masing-masing kelas.

Penutup. Dengan kurikulum dan sistem pendidikan ini, diharapkan akan membentuk pola pikir yang konstruktif, kritis, mampu menganalisa, memetakan, serta mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Adaptasi, evaluasi, revisi dan validasi akan terus dijalankan guna menghasilkan sistem pendidikan terbaik sehingga dapat konsisten menghasilkan pemimpin dan staf militer profesional, serta menjaga marwah dan nama besar institusi Seskoad yang **Terbaik, Terhormat dan Disegani**.



QUO VADIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0

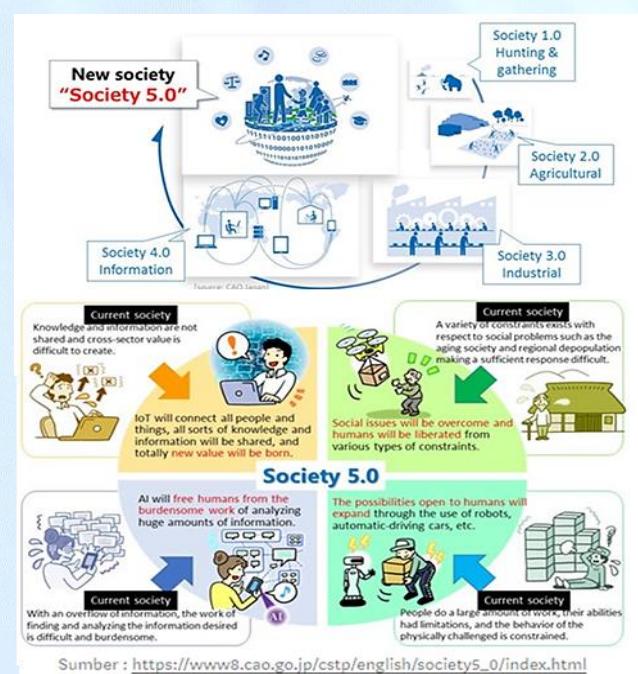
Kolonel Kav Suteja,S.H.,M.Si.

Prolog

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era saat ini sepertinya dapat mewujudkan sesuatu yang dulunya tidak mungkin menjadi kenyataan. Era saat ini lebih trennya disebut sebagai Revolusi Industri 4.0, yaitu suatu transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Proses produksi atau jasa yang awalnya membutuhkan waktu yang lama, sulit dan membutuhkan biaya mahal kini dapat menjadi lebih cepat, mudah, dan murah dalam prosesnya.

Jepang pada awal Januari 2019 telah memelopori perkembangan kehidupan masyarakat yang disebut dengan Society 5.0 atau Masyarakat 5.0. Masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*). Konsep ini lahir sebagai pengembangan dari Revolusi Industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia.

Tahapan dalam Masyarakat 4.0 adalah mengumpulkan informasi melalui jaringan dan dianalisa oleh manusia namun pada Masyarakat 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor-sensor dalam ruang nyata diakumulasi dalam ruang virtual, kemudian dianalisa oleh kecerdasan buatan/Artificial Intelligence (AI) selanjutnya hasil analisis akan diberikan kembali kepada manusia di ruang nyata dalam berbagai bentuk.



Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 pada saat ini terus berkembang, berbanding lurus dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat Indonesia.

Ditengah gempuran ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dihadapkan dengan pencapaian tugas pokok TNI AD yang memiliki salah satu fungsi utamanya melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter), maka timbul pertanyaan kritis, yaitu "Quo Vadis (ungkapan bahasa latin berarti "Hendak kemana ?) implementasi/pelaksanaan Binter TNI AD di era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0?"

Implementasi Binter TNI AD Saat Ini

Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga negara diantaranya TNI pada awal tahun 2020 telah disurvei secara nasional oleh beberapa Lembaga Survei independen. Hasil survei tersebut seperti pada tahun sebelumnya bahwa TNI kembali mendapatkan tempat teratas dari Lembaga Negara lainnya dalam kepercayaan publik atas kinerja yang telah dilakukan. Tingkat persentase yang diperoleh TNI berkisar antara 79% s.d 94% yang dilakukan oleh beberapa Lembaga Survei diantaranya *Indo Barometer*, *Cyrus Network*, *Politika Research Consulting (PRC)* dan *Parameter Politik Indonesia (PPI)* dengan menggunakan metodologi multistage random sampling dengan teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 1.200 s.d 2.197 responden yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia dan *margin of error* sekitar 2,13% s.d 2,85% serta pada tingkat kepercayaan mencapai 95%.

Keberhasilan TNI mendapatkan tempat teratas terkait hasil survei penilaian tingkat kepercayaan publik disamping dari aspek penilaian lainnya, tidak terlepas dari pengaruh kontribusi implementasi Binter TNI AD yang dilaksanakan oleh jajaran TNI AD secara langsung maupun tidak langsung, memberikan pelayanan pada publik di wilayahnya masing-masing. Namun demikian, hasil survei tersebut hanya dapat dijadikan salah satu referensi saja dan bukanlah menjadi suatu tolok ukur yang mutlak dan valid atas penilaian keberhasilan implementasi Binter TNI AD.

Parameter keberhasilan implementasi Binter TNI AD saat ini masih mengacu pada Petunjuk Teknis tentang Parameter Tugas Satkowil yang disahkan dengan Keputusan Kasad nomor KEP/722/IX/2016 tanggal 1 September 2016. Berdasarkan Petunjuk Teknis tersebut hanya dilakukan penilaian dari aspek internal Satkowil jajaran TNI AD saja yaitu berupa parameter pelaksanaan kegiatan Program Kerja dan Anggaran di bidang Pembinaan Satuan (Binsat) dan bidang Pembinaan Teritorial (Binter). Lantas, bagaimana bentuk parameter yang valid dan dapat mengukur keberhasilan implementasi Binter TNI AD dihadapkan dengan konteks mempersiapkan Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang tangguh dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat?. Parameter itu belum tersedia dan ini menjadi suatu Pekerjaan Rumah (PR) bagi seluruh prajurit TNI AD selaku insan teritorial untuk memberikan kontribusi positif bagi implementasi Binter TNI AD yang adaptif, aktual, transparan, akuntabel dan dapat diukur tingkat keberhasilannya secara akademis.

Fenomena Pengguna Internet di Indonesia

Ritme kehidupan manusia sebagai makhluk sosial berkembang dinamis karena kecanggihan internet diaplikasikan dalam telepon pintar/*smartphone* yang hampir rata-rata dimiliki oleh setiap orang. Aplikasi video call maupun video conference menjadikan era komunikasi antar manusia mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut riset platform manajemen media sosial Hootsuite dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk "Global Digital Reports 2020", sekitar 64% penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Riset yang dirilis pada akhir Januari 2020 itu menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 Juta orang, sementara total jumlah penduduk Indonesia sekitar 272,1 Juta orang. Dibanding tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau bertambah 25 Juta pengguna. Selama 2019, pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun memiliki waktu rata-rata selama 7

jam 59 menit per hari untuk berselancar di dunia maya. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 Juta orang, meningkat 8,1% atau bertambah 12 Juta pengguna dibandingkan tahun 2018. Dengan begitu, penetrasi penggunaan media sosial di Indonesia sudah mencapai 59 persen dari total jumlah penduduk.



Penetrasi pengguna internet yang semakin tinggi ternyata juga dibarengi dengan tingginya waktu mereka mengakses internet, Survei yang dilakukan Alvara Research Center terhadap 1550 responden di 6 kota besar di Indonesia menunjukkan fenomena ini. Hampir 15 % pengguna internet di Indonesia sudah terjangkiti kecanduan akses internet (addicted users), yang masuk kategori kecanduan ini adalah sekelompok orang yang menghabiskan lebih dari 7 jam dalam satu hari untuk mengakses internet, itu berarti waktu akses internet sama atau bahkan lebih dari jam tidur mereka dalam satu hari.

Pemanfaatan Internet/Medsos Bagi Implementasi Binter TNI AD di Era 4.0



TNI AD beserta segenap jajarannya dalam mengimplementasikan Binter, dilandasi oleh Doktrin Induk Teritorial TNI AD yang disahkan dengan Keputusan Kasad nomor KEP/1055/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, disebutkan bahwa pengertian Binter TNI AD adalah kegiatan dalam membina hubungan

dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta Kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan negara matra darat. Hal tersebut secara kontinyu telah dilaksanakan oleh jajaran TNI AD, namun pada era saat ini masih perlu dioptimalkan.

Binter TNI AD dalam era Industri 4.0 dan era Masyarakat 5.0 pada paradigma implementasinya seharusnya dapat bersifat "adaptif"/dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yaitu mau merubah konsep berpikir linear dan terkungkung dengan format kaku menjadi paradigma yang komprehensif, luwes, tanggap, kreatif dan inovatif dalam implementasi di lapangan. Salah satu cara dalam menghadapi era Industri 4.0 dan era Masyarakat 5.0 dari implementasi Binter TNI AD adalah dengan memanfaatkan internet/media sosial yang kini menjadi kebutuhan manusia modern dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk sosial. Binter TNI AD di era saat ini secara mudahnya dapat disebut sebagai istilah "Binter Digital". Binter Digital diharapkan dapat menyiapkan secara dini manusia Indonesia yang modern namun tetap terpelihara semangat bela negara dan cinta tanah air sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Implementasi Binter TNI AD (dhi.Metode Komsos) saat ini masih belum optimal dalam bersinergi sehingga hal ini bisa menjadi suatu kendala. Kendala tersebut diindikasikan pada pelaksanaan kegiatannya masih menggunakan metode tatap muka secara langsung sehingga membatasi ruang dan waktu serta efeknya hanya sebatas komunitas orang tertentu yang diundang hadir dalam acara tersebut. Hal ini sekaligus menjadi peluang untuk terus berupaya mengoptimalkannya disesuaikan dengan perkembangan zaman maupun tingkat pendidikan/pemahaman masyarakat yang menjadi komunikasi (orang penerima pesan dari komunikator/pemberi pesan dalam proses komunikasi).

Pemanfaatan internet/medsos dalam implementasi Binter Digital TNI AD secara sederhana berproses sebagai berikut : Pertama; Seluruh jajaran TNI AD pada Satkowil maupun Non Satkowil membuat/menciptakan konten pesan yang menarik, kreatif dan inovatif serta mengikuti tren kekinian namun



tetap terbatas sesuai norma keprajuritan dan tidak berklasifikasi Rahasia.

Kedua; Dalam pembuatan materi konten agar dikuatkan dengan referensi/piranti lunak lainnya sebagai dasar validitas.

Ketiga; Materi konten yang kreatif, inovatif, menarik dan kekinian akan memancing komunikasi untuk mau menonton video/materi konten tersebut.

Keempat; Respon komunikasi yang mendapatkan manfaat atau terinspirasi maupun menyukai setelah melihat dan mendengar materi konten tersebut diharapkan menjadi *follower*/pengikut dari Binter/Komsos Digital jajaran TNI AD.

Kesuksesan tersebut dapat diindikasikan dengan semakin banyaknya viewer/penonton dan respon dengan retweet/tanda jempol keatas maupun sebagai *follower* tetap/*subscriber* secara natural dari komunikasi itu sendiri.

Penutup.

Keterpaduan aksi nyata di lapangan pada implementasi Binter TNI AD dengan "Binter Digital" akan menjadi daya yang dahsyat dalam mengejawantahkan keberhasilan pencapaian tugas pokok TNI AD maupun tugas-tugas lain khususnya di bidang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Eksistensi prajurit TNI AD pada pengabdinya dalam implementasi Binter di lapangan dapat dinilai secara "real time" berkat pemanfaatan internet/media massa sebagai salah satu poin tolok ukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial TNI AD.

"Binter Digital" akan menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi penguatan Ruang, Alat dan Kondisi Juang pada masyarakat Indonesia dalam bingkai Kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Semesta. Pemanfaatan internet/medsos pada implementasi "Binter Digital" secara masif dalam konten yang positif maka secara langsung atau tidak langsung akan memengaruhi pola pikir maupun pola tindak dari masyarakat Indonesia dalam mencintai bangsa dan negara serta keikutsertaannya untuk "Bela Negara".

Kolonel Kav Suteja, S.H., M.Si., merupakan lulusan Akmil 1998 dan saat ini menduduki jabatan Dosen Madya Seskoad. Prestasi yang pernah diraih diantaranya Juara I Lomba Karya Tulis Rabiniscab TNI AD Kelompok Pamen/Pama (2013); Juara I Lomba Karya Tulis Artikel Tingkat Mabes TNI (2017) dan Juara I Lomba Karya Tulis Teritorial Kelompok Pamen (2018).



IMPLEMENTASI “DUAL USE” BEKANG TNI AD DALAM MENGHADAPI ANCAMAN AKTUAL **MAYOR CBA I KETUT ARSANA PUTRA, S.T., M.SC**

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia seperti tidak pernah berhenti didera berbagai masalah, mulai masalah politik, konflik horisontal, terorisme, gerakan separatisme, bencana alam serta yang paling aktual adalah wabah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Perjalanan Bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari segala ancaman dan gangguan menghadang yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap terjadinya bencana, terutama karena letak wilayah negara Indonesia yang berada pada pertemuan 3 (tiga) lempeng tektonik utama dunia serta kondisi alamnya yang terdiri dari hutan, gunung-gunung terutama gunung berapi, aliran sungai dan rawa-rawa.

Bencana baik alam maupun non alam seperti wabah Covid-19 yang sedang terjadi saat ini, pada dasarnya sulit diprediksi walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dan maju secara pesat, namun belum mampu memprediksi dan memperkirakan kapan, di mana dan jenis bencana apa yang akan terjadi.

Akibat kondisi tersebut maka setiap terjadinya bencana selalu menimbulkan korban jiwa, harta benda serta kerusakan daerah. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang merupakan komponen utama pertahanan di matra darat, sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas pokok TNI baik dalam Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Keberhasilan dalam melaksanakan tugas tersebut sangat tergantung dengan kesiapan seluruh unsur yang dimiliki oleh TNI AD. Di masa mendatang tugas yang dihadapi akan semakin kompleks dan berat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kesiapan seluruh komponen yang ada dalam TNI AD untuk dapat menghadapi ancaman dan tantangan yang menghadang. Kemampuan TNI AD yang tangguh juga harus didukung oleh sistem dukungan logistik yang memadai serta angkutan militer untuk mobilitas pergeseran pasukan dan logistik dari daerah pangkalan menuju daerah operasi atau bencana. Di dalam TNI AD, badan yang bertugas menyelenggarakan pembekalan angkutan militer adalah Pusat Pembekalan Angkutan Darat (Pusbekangad). Kemampuan melaksanakan tugas di lapangan ditentukan oleh seluruh komponen beserta perlengkapannya.

Daya tahan atau daya juang operasi yang dilakukan oleh pasukan sangat ditentukan oleh sistem daya dukung logistik yang memadai pula. Keberadaan Satuan Bekang TNI AD pada hakekatnya bertujuan untuk mendukung pencapaian tugas-tugas satuan TNI-AD diseluruh wilayah Indonesia dalam bidang pertahanan.

Dukungan Satuan Bekang TNI AD sangat penting untuk menopang operasi kemanusiaan (penanggulangan bencana) yang dilakukan oleh TNI AD dan pemerintah. Kemampuan operasi kemanusiaan (operasi bencana) ditentukan oleh seluruh komponen yang terlibat salah satunya adalah Bekang TNI AD beserta alat peralatannya. Keberhasilan pelaksanaan peran Bekang dalam rangka operasi kemanusiaan (penanggulangan bencana), dapat kita lihat dari peristiwa bencana yang terjadi seperti gempa bumi dan tsunami Aceh-Nias (2004), gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah (2006), gempa bumi Sumatera Barat (2007), banjir Jakarta (2007), gempa bumi Bengkulu (2007), gempa bumi Sumatera Barat (2009), tsunami Mentawai (2010), banjir bandang Wasior (2010), erupsi gunung Merapi (2010), lahar dingin Gunung Merapi (2011), banjir Jakarta (2012, 2013, dan 2014), erupsi gunung Sinabung (2013), erupsi Gunung Kelud (2014), tanah longsong di Banjarnegara (2016), tanah longsor di Brebes (2018), Tsunami Banten (2019), pandemi Covid-19 (2019), serta yang terbaru adalah banjir di Kalimantan Selatan (2021) dan gempa bumi di Mamuju, Majene Sulawesi Barat (2021).

Dari latar belakang tersebut diatas akan dikupas bagaimana implementasi fungsi ganda "*dual use*" Bekang TNI AD dalam menyelenggarakan dukungan fungsi Bekang guna menghadapi ancaman aktual ke depan khususnya bencana. Implementasi "*dual use*" Bekang TNI AD secara langsung telah mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Pembahasan

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan ganguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara di matra darat.

Adapun tugas Bekang TNI AD adalah memberikan pelayanan pembekalan, pemeliharaan serta jasa kepada seluruh satuan di bawah TNI AD. Dalam kaitan penanggulangan bencana alam, tugas Bekang TNI AD dilaksanakan melalui OMSP sesuai pasal 7 ayat 1 nomor 12 yaitu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Tugas ini tidak dapat dilaksanakan oleh Bekang TNI AD secara berdiri sendiri tetapi harus bekerja bersama dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk tingkat pusat bekerjasama dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan kementerian terkait lainnya, sedangkan di daerah bekerjasama dengan Pemda, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan instansi terkait lainnya. Khusus pada tahap tanggap darurat sesuai tugas pokok tersebut, TNI AD (Bekang) diminta ataupun tidak diminta langsung terjun membantu penanggulangan bencana.

Bekang Dalam Penanggulangan Bencana

Salah satu elemen TNI AD yang cukup memadai dalam penanggulangan bencana terutama di tanggap darurat bencana adalah Bekang TNI AD. Bekang TNI AD memiliki sarana prasarana dan operasi yang terstruktur



Anggota Bekangad di dapur umum posko banjir di Kalimantan Selatan (2021)

dengan baik; meliputi sumber daya manusia, peralatan, transportasi dan lainnya. Untuk menanggulangi bencana baik bencana alam maupun non alam, Bekang TNI AD selalu membantu penanggulangan bencana yang timbul, artinya Bekang TNI AD selalu melaksanakan tugas melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dimana tugas Bekang TNI AD membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan yang dilaksanakan oleh TNI AD untuk mengurangi beban penderitaan masyarakat, mewujudkan rasa persaudaraan dan senasib sepenanggungan. Secara umum gambaran peran Bekang TNI AD dalam penanggulangan bencana sebagai berikut:

a. Pengorganisasian.

1) Kompi Intendans. Bekang menyiapkan personel dan peralatan dapur lapangan/ Randurlap dan mess lapangan dalam organisasi yang terdiri dari satuan-satuan Bekang yang siap digerakkan setiap saat. Untuk tingkat pusat ada rencana pembentukan Batalyon Jasaint yang berkedudukan langsung di bawah Pusbekangad, sedangkan untuk tingkat daerah terdapat Kompi Intendans Denharjasaint di masing-masing Bekangdam (Kotama) dan rencana pembentukan Yonbekang Kodam. Disamping itu pada masing-masing tingkat Komando Kewilayahan Korem ada Detasemen Pembekalan Angkutan (Denbekang) yang memiliki kemampuan penyelenggaraan pelayanan dapur lapangan serta mess lapangan setingkat Kompi Intendans. Kompi intendans berperan sebagai satuan tugas Bekang yang membantu atau diperbantukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi tanggap darurat bencana yang berskala nasional maupun daerah.

2) Kompi Angkutan Bermotor. Kompi Angkutan Bermotor (Angmor) yang ada di setiap Kotama (Bekangdam) merupakan organisasi Bekang yang meyelenggarakan angkutan darat yang siap digerakkan setiap saat. Untuk tingkat pusat ada Yonbekang 3/Rat yang berkedudukan di Jakarta di bawah Pusbekangad sedangkan untuk tingkat Bekang Kotama ada Kompi Angmor di masing-masing

Bekangdam. Kompi Angkutan bermotor ini berperan sebagai satuan tugas Bekang yang membantu atau diperbantukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi tanggap darurat bencana yang berskala nasional maupun daerah.



Angkutan Bermotor Bekang TNI AD

3) Kompi Angkutan Air/Kapal. Kompi Angkutan Air ataupun kapal yang ada di Kotama (Bekangdam) merupakan organisasi di dalam Bekang yang terdiri dari kapal ADRI maupun kapal-kapal kecil/KMC untuk perairan dangkal serta sejumlah LCR yang siap digerakan setiap saat bila ada bencana di seluruh wilayah Indonesia. Untuk tingkat pusat ada Satuan Angkutan Air (Satangair) yang berkedudukan di Jakarta di bawah Pusbekangad sedangkan untuk tingkat daerah (Bekang Kotama) ada Kompi Air dan Kapal di masing-masing Bekangdam. Kompi Angkutan Air/ Kapal berperan sebagai satuan tugas Bekang yang membantu atau diperbantukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi tanggap darurat bencana yang berskala nasional maupun daerah.



Angkutan Air/Kapal Bekang TNI AD

b. Pelatihan.

- 1) Melaksanakan gelar kesiapan unit-unit yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- 2) Melaksanakan latihan penanggulangan bencana yang melibatkan pemerintah maupun Tagana setempat. Tujuan dari latihan tersebut adalah untuk memperkuat kerjasama dan saling pengertian diantara komponen yang menangani bencana di Indonesia.
- 3) Geladi Posko/simulasi penanggulangan bencana (pendirian dapur lapangan, penggerahan angkutan darat dan angkutan air).

c. Tanggap Darurat Bencana.

- 1) Bekang sebagai institusi yang dipersiapkan dan diperlengkapi untuk melaksanakan tugas-tugas OMP dan OMSP memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam kondisi dan situasi darurat seperti halnya dalam penanggulangan bencana. Guna mengefektifkan kapasitas dan kemampuan tersebut perlu penyiapan dan penyusunan unit tugas Bekang baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk dapat bereaksi secepat-cepatnya untuk menanggulangi bencana yang terjadi khususnya dalam tahap tanggap darurat (*Emergency Response*) dengan tetap berkoordinasi dengan BNPB/ BPBD sebagai leading sector di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- 2) Dalam menangani tindakan awal penanggulangan bencana, personel Bekang yang dilibatkan tergabung di bawah koordinasi BNPB/BPBD.
- 3) Guna mempercepat proses penanggulangan bencana maka tim awal Bekang diterjunkan ke daerah bencana pada kesempatan pertama.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahap Tanggap Darurat adalah :

- a) Mengamankan wilayah yang terkena bencana.
- b) Mengadakan pencarian terhadap korban.
- c) Mengevakuasi korban ke tempat yang aman menggunakan modus angkutan darat maupun angkutan air.
- d) Membantu dan mendorong logistik menggunakan angkutan darat, air maupun udara.
- e) Membuka dapur umum untuk masyarakat yang menjadi korban.



Bekang TNI AD Membantu dan mendorong logistik menggunakan angkutan darat dalam penanggulangan bencana



Bekang TNI AD Membantu dan mendorong logistik menggunakan angkutan Air dalam penanggulangan bencana



Bekang TNI AD Membantu dan mendorong logistik menggunakan angkutan Darat dalam penanggulangan bencana

d. Pengendalian.

Selama pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, pengendalian berada di bawah koordinasi BNPB/BPBD sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana. Implementasi “Dual Use” Bekang TNI AD Implementasi Dual Use merupakan salah satu implementasi yang saat ini dan ke depan akan semakin berkembang dan banyak dilakukan oleh negara di dunia khususnya institusi militer.

Produksi untuk kebutuhan alat peralatan pertahanan (Alutsista militer) sudah mulai mempertimbangkan kemungkinan penggunaanya ke bidang lain yang sifatnya komersil dan keperluan sipil selain kegunaan utama dan asasnya sebagai alat perang termasuk untuk mendukung kegiatan misi kemanusiaan (penanggulangan bencana).

Untuk negara kita Indonesia, implementasi “dual use” ini didorong oleh perkiraan ancaman aktual ke depan sesuai yang tercantum dalam kebijakan pertahanan negara (Jakhanneg 2020) adalah perubahan iklim yang berpotensi menimbulkan bencana alam.

Perkiraan ke depan ancaman militer semakin kecil walaupun kita harus tetap waspada sekecil apapun ancaman tersebut. Dengan demikian semakin sedikitnya operasi yang mengerahkan kekuatan militer, sehingga banyak negara di dunia termasuk Indonesia institusi militernya semakin memiliki banyak waktu atau periode senggang, sementara institusi militer ini memiliki kapasitas yang sebetulnya bisa diberdayagunakan di bidang lain yakni OMSP. Oleh karena itu, kondisi (*idle capacity*) ini dapat diberdayakan untuk tugas-tugas lain termasuk untuk penanggulangan bencana.

Sejarah kebencanaan Indonesia telah mencatat bagaimana peran dan kontribusi dominan TNI AD dalam upaya penanggulangan bencana. Walaupun dengan kesiapan yang kurang optimal dan tidak didukung oleh alat peralatan kebencanaan yang memadai, tetapi TNI AD selalu tampil terdepan dan tanpa ragu untuk membantu dan menyelamatkan masyarakat dari dampak bencana alam yang terjadi.

Semangat pengabdian, militansi dan kerelaan hati para prajurit TNI AD demi keselamatan masyarakat yang terdampak bencana ini sebetulnya dapat jauh lebih efektif dan optimal apabila secara organisasi, SDM dan alat peralatannya didukung secara memadai termasuk Bekang TNI AD.

Penutup

Berdasarkan berbagai penelitian dan pendapat para ahli kebencanaan, ke depan, negara Indonesia akan menghadapi berbagai bencana yang magnitudonya sangat besar dan mematikan, baik bencana yang sifatnya alamiah maupun bencana yang disebabkan oleh perbuatan dan kelakuan negatif manusia Indonesia sendiri. Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bagi pemerintah sebagai leading sector kebencanaan dan seluruh pihak terkait untuk duduk bersama guna merumuskan upaya penanggulangan bencana yang holistik dan sinergis, termasuk bagaimana menempatkan posisi, peran dan tugas TNI AD dengan *idle capacity*-nya secara tepat dan berhasil guna dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana serta mengurangi dampak resikonya.

Di satu sisi memang TNI AD tugas pokoknya adalah OMP, tetapi disisi lain ada juga tugas OMSP yang salah satunya adalah penanggulangan bencana (alam maupun non alam). Dan memang dari pengalaman selama ini TNI AD khususnya satuan Bekang telah mengimplementasikan fungsi gandanya “dual use” yakni disamping melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara (OMP) juga telah berperan aktif melaksanakan misi kemanusiaan membantu penanggulangan bencana seperti yang disebutkan di atas. Implementasi “dual use” TNI AD khususnya satuan Bekang memang sangat relevan untuk ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan tugas ke depan menghadapi salah satu ancaman actual yakni bencana.

**Mayor Cba I Ketut Arsana Putra, S.T., M.Sc.
adalah Abituren Pendidikan Regular LX
SESKOAD TA 2021**



KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI TENTARA KONTRAK DALAM SISTEM PERTAHANAN NEGARA RUSIA

Major Inf Abdul Rizka Fitrawan, S.I.P.

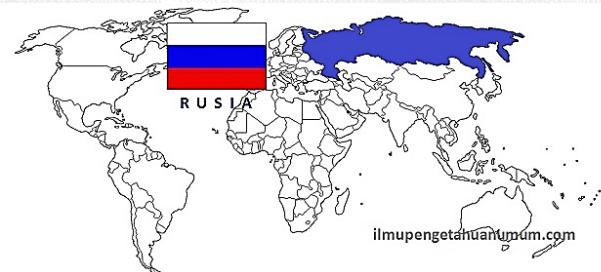
PENDAHULUAN

Sejak akhir tahun 2000, Rusia telah meluncurkan program untuk memodernisasi Alutsista Angkatan Bersenjata negaranya. Demi merealisasikan program tersebut, pemerintah Rusia telah mengalokasikan anggaran sekitar 22.500 miliar rubel (\pm 4.942 triliun rupiah) guna memodernisasi Alutsista. Saat ini jumlah peralatan modern yang dimiliki Angkatan Bersenjata Rusia telah mencapai 68 persen dari total Alutsista yang ada, termasuk Alutsista ex-Uni Soviet. Rusia memiliki kekuatan pasukan sebesar 1.014.000 personel aktif dengan area seluas 17 juta Km² yang menjadi tanggung jawab pertahanan negara. Saat ini Rusia memiliki sekitar 2.000.000 personel cadangan yang tergabung dalam komponen cadangan serta terdiri dari 384 ribu tentara kontrak yang bertugas di Angkatan Bersenjata Rusia. Rusia berencana akan meningkatkan jumlah tentara kontrak menjadi 475 ribu pada 2025, sisanya adalah prajurit dan perwira wajib militer. Persyaratan untuk menjadi prajurit kontrak diatur dalam undang-undang "Kerja dan Dinas Militer".

Berdasarkan UU tersebut, pendaftar harus memenuhi sejumlah persyaratan medis serta target kebugaran tertentu (cepat, ulet dan kuat) sesuai divisi militer yang dipilih dan batasan usia pendaftar ditetapkan hingga 40 tahun. Pendaftar juga harus lulus pendidikan menengah dan telah menyelesaikan wajib militer. Selain itu, para calon prajurit kontrak tidak boleh memiliki catatan kriminal. Jika telah memenuhi semua persyaratan di atas, maka dapat dipersilakan untuk bergabung dengan angkatan bersenjata dengan pangkat tamtama (pangkat paling rendah). Nantinya, mereka akan mendapatkan gaji sekitar 30.000 rubel (sekitar 6,6 juta rupiah) per bulan. Besaran gaji tergantung pada wilayah bertugas, jenis layanan, serta tanggung jawab yang diemban.

Wajib militer memiliki beberapa peranan penting bagi negara Rusia dimana diantaranya adalah Pertama, wajib militer sebagai cadangan utama angkatan bersenjata jika terjadi perang. Wajib militer merupakan personel yang secara fisik dan psikologi dilatih untuk melaksanakan dinas militer, serta memiliki kemampuan bertempur dan menembak, serta mengoperasi-

kan peralatan, dan mentaati segala perintah atasannya. Kedua, Rusia saat ini belum mampu memiliki pasukan yang sepenuhnya profesional. Rusia masih harus melakukannya secara bertahap. Saat ini warga negara asing dapat bergabung dalam unit angkatan bersenjata Rusia. Sistem perekrutan tentara Rusia telah menjadi perdebatan selama 25 tahun terakhir.



Peta Wilayah Negara Rusia

Rusia juga menganut sistem seperti perekrutan negara-negara yang menggunakan kekuatan militernya untuk melaksanakan pertempuran secara *offensive* yaitu melaksanakan ekspansi keluar wilayah negaranya dan biasanya memilih sistem tentara kontrak. Sedangkan negara yang bersifat defensif guna melindungi kedaulatan dan kemerdekaan negaranya sendiri cenderung menggunakan sistem rekrut Wamil atau gabungan antara Wamil dan kontrak. Peraturan hukum di Rusia menetapkan jumlah personel militer negara tersebut dalam satuan satu juta orang. Jika angkatan bersenjata memiliki 250 ribu perwira dan 500 ribu tentara kontrak, maka jumlah anggota militer dari program Wamil tidaklah terlalu besar, yakni 250 ribu orang. Dengan demikian, angkatan bersenjata Rusia lebih memilih personel yang benar-benar dibutuhkan dalam perekrutan prajurit berdasarkan data fisik dan psikologi, tingkat pendidikan, keterampilan teknis, dan parameter lain.

Pada tahun 2022 Rusia akan merekrut tentara kontrak setidaknya 55 ribu orang. Jumlah tersebut akan ditambah hingga mencapai angka 350-355 ribu orang. Pemenuhan akan personel militer melalui tenaga kontrak nantinya akan diarahkan ke dalam satuan tempur khusus, marinir, pasukan lintas udara, pos-pos militer komando muda, serta divisi yang berhubungan dengan eksploitasi alat dan senjata teknologi tingkat

tinggi dalam satuan roket strategis dan pertahanan udara serta luar angkasa Rusia. Di Rusia komponen cadangan secara khusus dibentuk dengan kualifikasi untuk dapat bergabung dan menjalankan fungsi layaknya komponen utama/reguler.

Komponen cadangan tersebut juga memperoleh pembinaan dan pelatihan, serta kompensasi gaji dan jaminan sosial yang layak. Dalam statusnya komponen cadangan bisa sukarela (dari warga sipil) dengan rekrutmen melalui pendaftaran/aplikasi, wajib militer, atau otomatis diambil dari mantan prajurit dan kekuatan-kekuatan yang sudah siap.



Personel militer Rusia

Wajib militer bagi seluruh warganegara diselenggarakan dengan memperhatikan adanya tingkat ancaman terhadap pertahanan negara, dalam situasi darurat, atau pertimbangan sumber daya nasional. Penulis berupaya untuk mengangkat pembahasan terkait dengan komponen cadangan negara Rusia dan bagaimana langkah kongkrit yang telah diambil oleh pemerintah Rusia dalam pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negaranya. Sehingga nantinya dapat diambil suatu pembelajaran berharga yang dapat dipetik dengan membandingkan sistem pertahanan sebuah negara khususnya negara Rusia.

Pembahasan

Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan pembentukan dua batalyon pertahanan teritorial yang mana seluruh personel militer diperoleh dari hasil perekrutan warga sipil di seluruh distrik militer, yang tergabung dalam komponen

cadangan sebagai tentara kontrak. Persiapan ini merupakan bagian dari latihan utama tahunan dengan sandi latihan Kavkaz-2021 dalam rangka mengumpulkan kekuatan cadangan. Pada tahun ini untuk pertama kalinya, Kementerian Pertahanan Rusia telah mengumumkan bahwa sebagian dari latihan bertujuan untuk membentuk batalyon teritorial yang terdiri dari 500 personel cadangan yang dibentuk sebagai unit infanteri angkatan laut guna pemenuhan personel infanteri angkatan laut 810. Batalyon ini nantinya memiliki kemampuan dasar infanteri angkatan laut dan pertahanan pesisir.

Sedangkan di wilayah Novosibirsk akan dibentuk batalyon 116 senapan bermotor pertama dari 400 personel cadangan. Kedua Batalyon tersebut merupakan warga sipil yang telah direkrut dalam prajurit kontrak di bawah departemen unit pertahanan teritorial sebagai komponen cadangan. Perekutan komponen cadangan pertama nantinya akan disatukan dalam Brigade Infanteri Angkatan Laut sedangkan perekutan kedua akan diorganisir oleh sekolah komando militer tinggi Novosibirsk (Angkatan Darat).

Rusia juga telah memiliki resimen pertahanan teritorial dengan kekuatan penuh yang dibentuk di wilayah Stavropolskiy Kray, dimana resimen ini membawahi Batalyon di Krimea dan Novosibirsk. Program satuan teritorial dengan merekrut personel dari warga sipil guna masuk dalam komponen cadangan melalui tentara kontrak, adalah bagian dari program cadangan eksperimental yang masih baru (masa kontrak 3 tahun) guna dimobilisasi secara teratur untuk latihan strategis-operasional.

Munculnya gagasan berbasis cadangan ini diumumkan sebagai bagian dari 'pengenalan' sistem baru dalam melatih dan membentuk komponen cadangan, guna menghidupkan cadangan eksperimental Rusia. Ketika militer Rusia menjalani periode reformasi pada akhir 2008-2012, Rusia membentuk pasukan tetap tanpa cadangan. Komponen cadangannya hanya berupa daftar nama orang di atas kertas saja, akan tetapi pemanfaatan komponen cadangan warga sipil tidak dapat diberlakukan dikarenakan tidak memiliki kemampuan dasar dalam penggunaan perlengkapan dan Alutsista

militer, karena tidak pernah mendapatkan pelatihan dasar selama bertahun-tahun, dan tidak akan mungkin dapat dijadikan sebagai unit yang dilibatkan dalam pertempuran. Komponen Cadangan saat ini dapat berfungsi sebagai unit pertahanan teritorial dasar, menjaga fasilitas pos pemeriksaan, tetapi mereka tidak dapat melakukan operasi tempur. Kondisi tersebut tentunya menjadi suatu keterbatasan dalam pemenuhan pasukan secara besar guna menghadapi pertempuran konvensional dimana membutuhkan standarisasi kemampuan militer tertentu. Hal ini tentunya akan menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimana Rusia memenuhi kebutuhan personel dan menyediakan tenaga pengganti dalam pertempuran?.

Kemampuan Batalyon pertahanan teritorial Rusia tidak disiapkan untuk melaksanakan tugas dalam pertempuran konvensional, kekuatan darat Rusia sebenarnya cukup kecil jika kita melihat komposisi Angkatan Darat, pasukan lintas udara dan infanteri angkatan laut berjumlah ± 300.000 pasukan dan hanya mampu menguasai seperdelapan dari daratan Rusia dan masih banyak wilayah daratan yang harus dipertahankan guna melengkapi unit manuver tempurnya.



Angkatan Bersenjata Rusia

Rusia membutuhkan cadangan yang dapat setiap saat dipanggil guna menghadapi dan memiliki kemampuan tempur. Keterbatasan personel militer Rusia dapat dilihat dari beberapa konflik yang terjadi di wilayah perbatasan dimana sampai dengan saat ini upaya pendudukan sebagian besar negara Ukraina tidak pernah dapat dilakukan oleh militer Rusia.

Pertumbuhan ancaman hibrida memaksa Rusia untuk meningkatkan efektivitas pertahanan teritorial dan konsep pertahanan teritorial lebih diarahkan pada keamanan internal, menekan adanya ancaman revolusi internal dan sejenisnya, daripada mendukung Angkatan Bersenjata. Hal tersebut tentunya dapat dilakukan guna mengelola stabilitas politik dalam negeri, namun tidak cukup menyelesaikan masalah Angkatan Darat sehubungan dengan perang secara konvensional. Pada 7 Mei 2012 Vladimir Putin pertama kali memerintahkan pembentukan komponen cadangan nasional bagi Angkatan Bersenjata, dan peresmian sistem baru untuk melatih dan memobilisasi cadangan. Perintah itu mulai berlaku pada 1 Januari 2013. Perintah selanjutnya untuk mendata cadangan dan menjalankan skema komponen cadangan yang ditandatangani pada 23 April 2013.



Vladimir Putin

Rencananya, sebelum menyelesaikan pelatihan wajib militer mereka akan ditawari kontrak selama 3 tahun. sebagai komponen cadangan, dengan pembayaran bulanan berkisar antara 5.000-8.000 Rubel per bulan. Rusia menetapkan gaji yang cukup menarik bagi peserta wajib militer untuk menandatangani kontrak cadangan dan waktu pelayanan dapat diperpanjang hingga usia tertentu. Pada September 2011, Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia membentuk sebuah departemen untuk memimpin organisasi unit pertahanan teritorial di seluruh badan pemerintah. Departemen ini berfungsi untuk memobilisasi baik penyiapan dan pemanggilan kembali dalam penugasan, pengerahan personel sesuai dengan spesialisasi dan penyiapan pangkalan

penampung serta penyiapan perlengkapan yang dibutuhkan guna melengkapi komponen cadangan. Penyiapan komponen cadangan diperoleh dari perekutan warga sipil yang telah menjalani wajib militer mulai dari usia 18-35 tahun setelah menempuh pembekalan selama 12 bulan maka akan dimasukkan kedalam pasukan cadangan dan dimasukkan sebagai komponen cadangan. Namun demikian ada beberapa yang dioperasionalkan guna memenuhi kebutuhan dan pengoperasionalan Alutsista, biasanya personel tersebut memiliki kemampuan dan keahlian khusus, sedangkan sisanya akan dicadangkan guna sewaktu-waktu negara membutuhkan tenaga personel tersebut.

Rata-rata waktu pelatihan penyegaran yang dihabiskan bagi komponen cadangan yang akan dipanggil kembali adalah sekitar 15-25 hari, dan bayarannya berkisar 450-600 RUB per hari. Usia yang dipanggil guna melaksanakan panggilan tugas adalah antara usia 28-50 tahun. Latihan singkat biasanya dilaksanakan tahunan guna menguji sistem komponen cadangan yang telah dipersiapkan oleh departemen unit pertahanan teritorial. Kegiatan ini diselenggarakan untuk menguji struktur komando yang terlibat dalam memanggil komponen cadangan, mengorganisir seluruh personel menjadi beberapa unit, dan memastikan kesiapan dari unit perbekalan yang ditunjuk untuk mendukung logistik, alkap dan persenjataan komponen cadangan. Latihan tersebut bertujuan untuk melatih kesiapan Angkatan Bersenjata maupun komponen cadangan guna memperoleh kecepatan dan kemampuan dalam pengelolaan (mobilisasi, staf komando, pangkalan peralatan) guna dapat disiapkan sebagai pasukan cadangan menjadi batalyon pertahanan teritorial. Dengan adanya pembentukan dua Batalyon dan satu Resimen teritorial, bertujuan sebagai cadangan kekuatan Angkatan Bersenjata yang dioperasionalkan sebagai pengamanan internal negara, serta memiliki lebih dari 300.000 personel sampai dengan saat ini. Peningkatan dalam pembentukan satuan pertahanan teritorial sebagai bagian dari strategi pertahanan berdasarkan perkembangan yang terjadi saat ini.

Sedangkan sisa cadangan lainnya secara teknis tersedia untuk tugas mendukung pembentukan satuan pertahanan teritorial lainnya. Namun demikian kekuatan satuan teritorial sebagai komponen cadangan tidak memiliki kemampuan dalam spesifikasi tempur secara konvensional guna di mobilisasi dalam rangka pertempuran secara besar-besaran. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani keputusan yang mewajibkan warga Rusia yang terdaftar sebagai komponen cadangan militer untuk melapor diri guna mengikuti pelatihan militer pada tahun 2021.

Warga Rusia yang merupakan bagian dari cadangan militer akan menjalani pelatihan wajib pada tahun 2021 di Angkatan Bersenjata Federasi Rusia dan badan keamanan federal. Pemerintah dan lembaga negara terkait termasuk didalamnya Kementerian Pertahanan Rusia telah mendapat instruksi guna memastikan terselenggaranya pelatihan wajib militer bagi komponen cadangan tersebut.



Kekuatan Personel Militer Aktif dan Cadangan Rusia tahun 2021.

Penulis dalam meneliti perlibatan sipil dalam sistem pertahanan Rusia menggunakan pendekatan pisau analisa SWOT dengan mengutamakan kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan guna menjawab penulisan esai ini.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah guna mendapatkan lesson learned dalam pemanfaatan hubungan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Rusia, dengan mempertimbangkan aspek-aspek peluang baik dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi.

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	
FAKTOR EKSTERNAL	PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT	
	GUNAKAN "S" UNTUK MEMANFAATKAN "O"	M'GHILANGKAN "W" & M'MANFAATKAN "O"	
	GUNAKAN "S" UNTUK MENGHINDARKAN "T"	M'MIN "W" UNTUK M'HINDARKAN "T"	

Analisa SWOT Komponen Cadangan Sebagai Tentara Kontrak Dalam Sistem Pertahanan Negara Rusia.

Dengan pisau Analisa SWOT penulis berupaya untuk memetakan langkah terbaik yang telah diambil oleh negara Rusia, dalam mengatur dan menyiapkan sistem pertahanan negaranya. Penulis berupaya untuk menganalisa dari kemungkinan langkah yang dapat diambil, dilihat dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Adapun upaya yang telah diambil oleh pemerintah Rusia dalam mengantisipasi guna menutupi berbagai kelemahan sistem pertahanannya, maka dapat terlihat sebagai berikut:

- Rusia mengambil Strategi (SO) dengan memanfaatkan peluang yang ada serta dibarengi dengan pengaruh eksternal yang dapat dijadikan sebagai peluang guna mendukung kekuatan internal yang sudah dimiliki oleh Angkatan Bersenjata Rusia, sehingga diharapkan kekuatan yang dimiliki saat ini dapat dimaksimalkan dengan memanfaatkan peluang dari eksternal guna mendukung serta meningkatkan kemampuan kekuatan dan gelar angkatan bersenjata dihadapkan dengan kondisi geografis yang dimiliki Rusia. Melalui perlibatan warga sipil dan WN asing yang telah memenuhi persyaratan sebagai komponen cadangan, guna memenuhi kebutuhan personel sehingga sistem pertahanan Rusia dapat tercapai secara maksimal.

Penggabungan kekuatan komponen utama dan cadangan dalam upaya penggelaran kekuatan Angkatan Bersenjata Rusia dengan melibatkan warga negara sipil, saat ini menjadi salah satu solusi yang sangat tepat guna mendukung kebutuhan personel dalam pemenuhan modernisasi Alutsista serta pengamanan wilayah teritorial guna penggelaran kekuatan.

b. Jika Rusia mengambil Strategi (ST), dalam mengembangkan kemampuan kekuatan dan gelar Angkatan Bersenjata dengan menggunakan kekuatan internal yang telah dimiliki, serta menghindari pengaruh eksternal. Dimana Rusia memiliki kelemahan dalam memobilisasi kekuatan militernya maka melalui pemberdayaan komponen cadangan tentunya hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Walaupun jika dilihat dari kemampuan komponen cadangan Rusia saat ini belum dapat mengimbangi dan melaksanakan operasi secara konvensional, namun deterrence effect yang diberikan kepada seluruh lawan di wilayah perbatasan tentunya akan dapat turut mempengaruhi.

c. Adapun pemanfaatan peluang guna meminimalisir kelemahan (WO), Rusia memiliki faktor kelemahan dimana dari segi geografi merupakan negara yang memiliki luas wilayah daratan yang berbatasan langsung dengan negara asing yang cukup luas dan memiliki beberapa musuh bersama di kawasan pasca pecahnya Uni Soviet. Namun demikian Rusia dalam upaya mengantisipasi berbagai ancaman kedaulatannya saat ini dapat memanfaatkan kekuatan dari perekutan warga sipil dan warga negara asing yang bersedia secara sukarela guna memperkuat sistem pertahanan negara Rusia, yang tergabung sebagai komponen cadangan. Pembentukan komponen cadangan ini pada dasarnya dapat menekan pengeluaran anggaran belanja pertahanan, dibandingkan harus membentuk tentara reguler aktif. Rusia mengetahui kelemahan dari kemampuan pembentukan komponen cadangan ini, namun dilihat dari spektrum ancaman saat ini pengamanan internal negara lebih diutamakan. Dan komponen cadangan dapat diturunkan guna mengantisipasi spektrum ancaman tersebut.

d. Pemanfaatan Strategi kelemahan dan ancaman (WT), dengan meminimalisir kelemahan serta menghindarkan aspek ancaman, gelar kemampuan dan kekuatan Angkatan Bersenjata Rusia tentunya sampai dengan saat ini tidak akan mungkin dapat sepenuhnya menggelar dan mendukung kemampuan Angkatan Bersenjata Rusia dalam melindungi kedaulatan negaranya. Sehingga berbagai upaya yang dilakukan tidak akan dapat memberikan suatu hasil yang signifikan jika hanya memanfaatkan kedua strategi ini, dengan rendahnya kualitas dan kemungkinan ancaman yang bersifat agresi dan konvensional maka mobilitas komponen cadangan tanpa adanya kekuatan dari komponen utama tidaklah mungkin dapat tergelar dengan kuat.

Sistem Pertahanan negara Rusia dengan mengkombinasikan kekuatan komponen utama dan kekuatan komponen cadangan saat ini dinilai sangat efektif, dihadapkan Rusia sampai dengan saat ini baru mampu dapat memoderensi Alutsista perangnya sebanyak 68 % saja dan sisa Alutsista yang dimilikinya masih merupakan ex-Uni Soviet. Sehingga sampai dengan saat ini masih dirasakan belum perlu adanya penambahan personel militer reguler aktif dalam mengoperasionalkan Alutsista tersebut. Namun demikian Rusia membentuk komponen cadangan serta memaksimalkan kemampuan dari komponen cadangan tersebut guna memperkuat dan mengisi beberapa kekurangan awak personel akibat dari dampak modernisasi Alutsista, dengan meningkatkan kemampuan dan keahlian dari personel tersebut yang dimasukkan dalam dinas prajurit kontrak. Sedangkan kekuatan komponen cadangan lainnya dimaksimalkan untuk melaksanakan pengamanan di satuan teritorial di wilayah masing-masing serta pengamanan internal dan pos-pos di wilayah perbatasan negara. Komponen cadangan yang terdata dan terorganisir akan dilengkapi dengan perlengkapan dan Alutsista lama yang dimiliki sebelumnya dari ex-Uni Soviet. Sedangkan bentuk hubungan dan kerjasama dalam pelibatan sipil dan militer dalam sistem pertahanan Rusia dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri adalah saat ini Rusia menganut konsep

penggabungan kekuatan antara komponen utama dan cadangan dimana komponen utama diproyeksikan guna menghadapi ancaman dari luar dan komponen cadangan diproyeksikan guna menghadapi ancaman yang mungkin timbul dari dalam dan wilayah perbatasan dengan kemampuan terbatasan. Dan jika ancaman dari luar yang bersifat invasi dan mobilisasi pertempuran secara konvensional Rusia tetap akan menggunakan komponen utamanya dalam menangkal berbagai bentuk ancaman yang bersifat mengancam kedaulatannya. Namun demikian Rusia saat ini sedang membentuk Resimen unit pertahanan teritorial yang telah dibekali dengan kemampuan tempur dan keahlian khusus lainnya, dimana nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kekuatan utama Angkatan Bersenjata Rusia.

Rusia menyadari bahwa posisi negaranya saat ini berada diantara negara-negara ex-Uni Soviet yang kontra terhadap Rusia, sehingga dapat mengganggu di beberapa wilayah perbatasan, walaupun Rusia menyadari bahwa kekuatan tersebut tidaklah besar.

Rusia melihat spektrum ancaman yang mungkin terjadi saat ini bagian dari perang hybrid dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk merongrong kedaulatan Rusia. Sehingga Rusia masih belum menata secara profesional kemampuan kekuatan personelnya dan lebih memilih untuk memanfaatkan serta mengkombinasikan kekuatan utama yang dimilikinya dengan komponen cadangan yang berada di wilayah-wilayah Rusia.

Langkah ini diambil guna memanfaatkan kemampuan pengamanan internal yang dimiliki oleh komponen cadangan yang telah ada tanpa mengeluarkan anggaran pertahanan yang begitu besar. Pelibatan antara militer dan warga sipil yang telah direkrut sebagai komponen cadangan maupun prajurit kontrak dilihat sangat efektif dan mudah dalam memobilisasi personel, khususnya di wilayah perbatasan guna melaksanakan tugas pengamanan wilayah di masing-masing wilayah yang dikoordinir oleh departemen unit pertahanan teritorial dan memiliki sifat sebagai pencegahan dan pengamanan internal.

Penutup.

Rusia merupakan negara besar dan memiliki kemampuan pertahanan yang cukup kuat dan menganut sistem pertahanan negara yang agresif dan cenderung offensive sehingga lebih mengedepankan pertempuran di wilayah negara lain, dan dalam sistem perekrutannya cenderung mengedepankan perekrutan pasukan yang dilakukan secara sistem kontrak dan perekrutan prajurit secara regular aktif. Namun demikian saat ini Rusia telah sedikit banyak mereformasi kekuatan militernya dengan menggabungkan kekuatan komponen utama dan komponen cadangan, dimana didalamnya juga dimasukkan prajurit kontrak, perekrutan wajib militer dan purnawirawan militer yang telah pensiun guna dapat dijadikan sebagai pasukan cadangan jika dibutuhkan. Rusia menyadari bahwa spektrum ancaman saat ini yang dihadapi oleh Rusia bersifat hybrid, sehingga Rusia melihat ancaman besar yang timbul tidaklah bersifat konvensional seperti dulu. Dengan demikian Rusia saat ini lebih memaksimalkan serta memanfaatkan komponen cadangan yang secara sukarela berkenan untuk bergabung sebagai tentara kontrak, guna melaksanakan tugas pertambuan terhadap Angkatan Bersenjata Rusia.

Dapat kita lihat dan petik suatu pembelajaran yang sekiranya dapat diterapkan dan implementasikan di negara Indonesia pada masa yang akan datang dan patut dipertimbangkan. Bagaimana menentukan setiap kebijakan pertahanan dimana harus disandingkan dengan spektrum ancaman yang dihadapi, sehingga tentunya hal ini dapat meningkatkan kekuatan pertahanan dan sumber daya yang dimiliki. Indonesia memiliki keuntungan *manpower* yang sangat besar, jika dapat dimanfaatkan dan dilibatkan dalam bagian dari komponen cadangan tentunya sangat bermanfaat bagi sistem pertahanan rakyat semesta kita. Pelibatan warga sipil dalam upaya pertahanan negara pada dasarnya memiliki suatu keuntungan yang sangat strategis yang dapat kita manfaatkan seperti halnya Rusia.

**Mayor Inf Abdul Rizka Fitrawan, S.I.P.
adalah Abituren Pendidikan Regular LX
SESKOAD TA 2021**



SINERGI ANTARA MILITER DAN SIPIL NEGARA UKRAINA DALAM SISTEM PERTAHANAN GUNA MENANGKAL ANCAMAN DARI LUAR NEGERI

MAYOR INF HADI MUSTOFA, S.AG., M.M.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu dari komponen bangsa, masyarakat dan militer merupakan kekuatan utama dalam sistem pertahanan negara. Militer sebuah negara dengan perkuatannya menggelar kekuatannya menjadi kekuatan inti, kekuatan cadangan dan kekuatan pendukung. Agar pelaksanaan tugas pokok berhasil, maka militer melaksanakan pembinaan teritorial untuk mendapatkan dukungan rakyat, dalam bentuk kemanunggalannya. Dengan kata lain militer negara manapun tentu membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil dalam menciptakan pertahanan negara guna menghadapi segala kemungkinan ancaman yang ada. Hal ini berarti pula bahwa sangat perlu menciptakan kerja sama yang baik dan saling memperkuat antara militer dan sipil dalam pelaksanaan Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta). Berkaitan dengan tugas Pasis yang membahas tentang sistem pertahanan semesta negara Ukraina, maka Pasis mencoba mencari beberapa bahan dari berbagai sumber guna mencari jawaban sesuai dengan tema judul penulisan ini.

Sejarah awal berdiri Negara Ukraina bermula pada abad ke-9, kaum Varangians mendirikan sebuah negara yang diberi nama Kievan Rus atau Kyivan Rus. Negara tersebut adalah salah satu negara terkuat pada abad pertengahan. Sayangnya negara Kievan Rus tak bertahan lama. Pada abad ke-12, Kievan Rus akhirnya bubar akibat disintegrasi. Masyarakat di Ukraina juga dikenal dengan nasionalismenya yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh sebuah peristiwa penyerahan kota Kyiv yang kontroversial. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1754, saat Hetman Bohdan Khmelnytsky menyerahkan kota yang saat ini menjadi ibukota Ukraina, kepada pihak negara Rusia. Akibatnya, peristiwa tersebut menjadi salah satu momen yang paling tidak disukai oleh masyarakat.

Pada tahun 1922, Ukraina menjalani sebuah perubahan besar. Pada tanggal 30 Desember di tahun yang sama, Republik Sosialis Ukraina Soviet menjadi salah satu pencetus penting dalam terbentuknya Negara Uni Soviet. Namun 46 tahun kemudian, Negara Uni Soviet runtuh. Ukraina kembali berdiri sendiri hingga saat ini.

Berdasarkan dari uraian singkat diatas, penulis membuat rumusan masalah dengan judul "Sinergi Antara Militer Dan Sipil Negara Ukraina Dalam Sistem Pertahanan Negara Guna Menangkal Ancaman Dari Luar Negeri". Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Nilai guna dari tulisan ini yang dapat diambil adalah agar pembaca dapat mengetahui tentang sinergi antara militer dan sipil dalam sistem pertahanan Negara Ukraina guna menghadapi ancaman militer dari luar.

PEMBAHASAN

Sejarah Kemerdekaan Negara Ukraina

Ukraina telah sejak lama menjadi pusat cadangan pangan dunia karena lahan pertaniannya yang luas dan subur, dan Ukraina masih menjadi salah satu pengekspor terbesar biji-bijian di dunia. Ekonomi Ukraina yang bermacam ragam, termasuklah sektor industri berat yang besar, khususnya di bidang penerbangan dan peralatan industri.



Peta wilayah negara Ukraina

Ukraina sendiri adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik yang menganut sistem semi presidensial dengan *Trias Politica* (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pusat negara dan kota terbesarnya adalah Kiev. Ukraina memiliki militer terbesar kedua di Eropa, setelah Rusia, jika personel cadangan dan paramiliter turut dihitung. Dua periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20, yang pertama menjelang akhir Perang Dunia I dan yang kedua adalah pada masa Perang Dunia II, tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatunya wilayah-wilayah Ukraina ke dalam sebuah Republik Soviet, situasi yang berlaku sampai tahun 1991, ketika Ukraina meraih kemerdekaannya dari Uni Soviet, segera setelah pembubarannya pada penghujung Perang Dingin.

Sejarah Pembentukan Negara Ukraina

No	Bentuk Negara	Tahun
1	Rus Kiev	882
2	Kerajaan Halych–Volynia	1199
3	Negara Rus	17 Agustus 1649
4	Republik Rakyat Ukraina	7 November 1917
5	Republik Sosialis Soviet Ukraina	10 Maret 1919
6	Pendudukan Soviet di Ukraina Barat	15 November 1939
7	Deklarasi kemerdekaan	30 Juni 1941
8	Kemerdekaan dari Uni Soviet	24 Agustus 1991

Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina>

Pasca bubarnya Uni Soviet, Ukraina mewarisi 1/3 dari keseluruhan fasilitas industri pertahanan Uni Soviet. Pada tahun 1991, terdapat banyak lembaga riset Alutsista di Ukraina, baik yang berafiliasi dengan Universitas, seperti *Kozhedub Kharkov University of Air Forces (KhUAF)* dan *Kharkov National University of Radioelectronics (KhNURE)*, yang melakukan penelitian tentang pengembangan kemampuan Radar. Selama beberapa dekade Uni Soviet sebelum 1991, Lembaga- Lembaga Riset tersebut berafiliasi dan mendapatkan support anggaran dari Rusia. Saat ini afiliasi dan dukungan anggaran oleh Rusia tengah dipertimbangkan untuk diakhiri oleh Rusia. Oleh sebab itu, Pemerintah Ukraina berupaya mencari solusi alternatif kemitraan bagi lembaga-lembaga tersebut, selain dari Rusia.

Kementerian Pertahanan Ukraina (Міністерство Оборони України) dibentuk pada tanggal 3 September 1991 dengan nama sebelumnya Komite Urusan Militer. Departemen Pertahanan Ukraina (*Міністерство оборони України*) didirikan pada tanggal 24 September 1991, satu bulan setelah Deklarasi Ukraina (Kemerdekaan Resolusi). Kementerian itu bertanggung jawab atas semua reorganisasi pasukan militer Soviet di wilayah yurisdiksi Ukraina. Departemen Pertahanan Ukraina membawahi Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Intelijen Ukraina dan Universitas Pertahanan Nasional. Perlu diketahui pula, pasca tahun 1991 setelah kemerdekaannya dari Uni Soviet, Ukraina mewarisi salah satu kekuatan militer terbesar tidak hanya di wilayah pasca-komunis, tetapi di seluruh Eropa (tidak termasuk Rusia). Ini termasuk 780.000 mantan personel militer Soviet, satu tentara roket, empat tentara Angkatan Udara, Tentara Pertahanan Udara terpisah dan Armada Laut Hitam.

Secara keseluruhan, ketika didirikan, Angkatan Bersenjata Ukraina mencakup lebih dari 350 kapal, 1.500 pesawat tempur dan 1.272 kepala perang nuklir strategis dari rudal balistik antar benua. Kekuatan ini dirancang untuk menghadapi NATO dalam peperangan skala penuh, menggunakan konvensional dan senjata nuklir.

Potensi pertahanan Ukraine pada saat ini, adalah Ukraine menempati peringkat 8-10 eksportir senjata dalam beberapa tahun belakangan ini, lebih tinggi dibanding beberapa negara, termasuk Korea Selatan, Nederland, Turki dan Belarusia. Meskipun demikian, tampaknya industri pertahanan Ukraine memang sedang dilanda sejumlah tantangan. Perubahan politik domestik maupun pertikaian dengan Rusia (tentang Krimea) dalam beberapa tahun ini membawa konsekuensi luar biasa, khususnya merosotnya nilai ekspor senjata Ukraine. Sumbangan sektor industri pertahanan bagi GDP Ukraine tidak lebih dari 1,5% saja. Ukraine menyumbang sekitar 1.5–3 % saja dari ekspor persenjataan global (bandingkan dengan Amerika 33%, Russia 25%, Perancis 5.6%, atau China 5.59%).

Sebagaimana diratifikasi oleh Verkhovna Rada (Parlemen Ukraine), tujuan utama kementerian adalah; (1) mencegah perrusuhan; (2) penataan militer; dan (3) menangkis semua jenis agresi (baik di dalam maupun luar negeri). Kebijakan keamanan Ukraine didasarkan pada non-intervensi, penghormatan terhadap perbatasan nasional dan kedaulatan negara lain, menolak penggunaan kekuatan apa pun sebagai instrumen pengaruh. Karena sensitivitas politik, doktrin militer, mirip dengan kebijakan keamanan Ukraine, tidak menunjukkan ancaman tertentu. Ini lebih mengacu pada negara yang kebijakan konsistennya menghadirkan ancaman militer, atau mengarah pada campur tangan dalam urusan dalam negeri Ukraine, atau melanggar integritas teritorial dan kepentingan nasional Ukraine. Karenanya, Kementerian Pertahanan bertanggung jawab untuk: (1) Dukungan untuk aktivitas sehari-hari Angkatan Bersenjata; (2) Kesiapan misi dan mobilisasi; (3) Nilai

kombatan; (4) Pelatihan untuk memenuhi misi dan keterlibatan yang ditugaskan; (5) Manning dan pelatihan yang sesuai; (6) Senjata dan perlengkapan perlengkapan militer; (7) Materi, pendanaan dan sumber daya lainnya sesuai dengan kebutuhan; (8) Kontrol atas penggunaan sumber daya ini secara efektif; (9) Mengembangkan interoperabilitas dengan kekuatan eksekutif, badan sipil, dan warga sipil; (10) Kerjasama teknis militer dan militer internasional; (11) Kontrol atas kepatuhan kegiatan Angkatan Bersenjata dengan Hukum; dan (12) Mengembangkan kondisi untuk kontrol sipil atas Angkatan Bersenjata.

Dalam kurun waktu singkat, *Verkhovna Rada Ukraine* melewati beberapa tindakan legislatif mengenai bidang militer, yaitu (1) Konsepsi Pertahanan dan organisasi Angkatan Bersenjata Ukraine; (2) Resolusi "Pada Dewan Keamanan dari Ukraine; (3) Hukum Ukraine Pada Pertahanan Ukraine; (4) Pada Angkatan Bersenjata Ukraine; dan (5) Doktrin Militer Ukraine.

Sebagian besar terkait dengan kontrol struktural Angkatan Bersenjata. Perombakan dalam pemerintahan departemen militer berdampak agak negatif pada proses pembangunan militer. Dari 1991 hingga 1996, tiga Menteri Pertahanan dan empat Kepala Staf Umum diubah. Sekitar 70% staf administrasi diubah pada tahap awal pembentukan Angkatan Bersenjata Ukraine.

Semua komandan distrik militer, komandan tentara, korps dan komandan divisi diubah beberapa kali. Masalah ini diperumit oleh ketidakstabilan negara, terkait dengan dislokasi personel militer internasional. Sekitar 12.000 perwira berjanji setia kepada negara lain (Sebagian besar Rusia) dan lebih dari 33.000 personel kembali untuk melayani tentara Ukraine antara tahun 1991 hingga 1994. Tidak diragukan lagi, bahwa alasan utama ketidakpuasan realisasi prosedur utama proses pembangunan Angkatan Bersenjata adalah pengurangan permanen dari sebagian pengeluaran umum untuk Pertahanan Nasional sama sekali biaya untuk Angkatan Bersenjata, pembelian persenjataan dan kendaraan militer, menyediakan teknik penelitian dan upaya desain.

Konflik Perang Saudara.

Pada tahun 2013, protes melawan pemerintah Presiden Yanukovych pecah di tengah kota Kiev setelah pemerintah membuat keputusan untuk menghentikan Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa dan menjalin hubungan ekonomi yang lebih akrab dengan Rusia. Keputusan ini memicu gelombang demonstrasi dan protes selama berbulan-bulan yang disebut sebagai Euromaidan.

Peristiwa ini memuncak menjadi Revolusi Ukraina (2014) yang berujung pada tergulingnya Yanukovych dan pembentukan pemerintah baru. Peristiwa ini menimbulkan pencaplokatan Wilayah Krimea (sebagian besar penduduk Krimenia adalah Etnis Rusia) oleh Rusia pada bulan Maret 2014, dan Perang di Donbass pada bulan yang sama; kedua-duanya masih berlangsung per Mei 2016. Pada tanggal 1 Januari 2016, Ukraina bergabung dengan Kawasan Perdagangan Bebas Menyeluruh dan Mendalam dengan Uni Eropa.

Perang saudara di timur Ukraina telah berlangsung sejak 7 April 2014. Konflik bersenjata ini terjadi ketika pasukan tentara Ukraina berkonfrontasi dengan pasukan Republik Rakyat Donetsk (DNR) dan Republik Rakyat Lugansk (LNR) yang memproklamarkan kemerdekaannya dari Ukraina. Pada Desember 2014, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menegaskan posisi resmi pemerintah Rusia terkait krisis Ukraina. Medvedev menekankan bahwa Krimea adalah bagian dari Rusia dan Donbass adalah bagian Ukraina. Sementara, Kemenlu Rusia dan Kremlin menekankan bahwa pemerintah Rusia tak bertanggung jawab atas warga Rusia yang pergi ke Donbass dan berperang di pihak separatis karena mereka pergi atas inisiatif mereka sendiri. Moskow bahkan menegaskan bahwa pemerintah tidak mengakui DNR dan LNR.

Pertempuran sengit di timur Ukraina terus berlangsung hingga Perjanjian Minsk berhasil dicapai pada 12 Februari 2015. Setelah itu, situasi sempat membaik, tetapi hingga kini aksi saling serang masih terus berlangsung. Jika krisis ini tak segera diselesaikan, ini jelas akan memengaruhi Eropa.

Akibatnya, pengiriman senjata secara ilegal akan semakin marak, kelompok radikal akan semakin meluas, dan arus imigran akan terus meningkat.

Belakangan ini, bentrokan antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Moskwa di timur Ukraina telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir, membantalkan gencatan senjata yang ditengahi tahun lalu. Menyusul meningkatnya ketegangan dengan Ukraina, Rusia telah membangun pasukan di sepanjang perbatasan, meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi besar dalam konflik berkepanjangan di timur Ukraina yang sebagian besar berbahasa Rusia.

Bentuk Hubungan/Kerjasama/Sinergi Militer Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Ukraina

Setelah kemerdekaan, Ukraina menyatakan diri sebagai negara netral, tetapi masih mempertahankan kemitraan militer terbatas dengan Federasi Rusia, negara-negara CIS lainnya dan kemitraan dengan NATO sejak tahun 1994. Pada tahun 1994 Ukraina secara sukarela menyerahkan semua senjata nuklirnya. Kementerian menghabiskan dana yang signifikan untuk menghilangkan bekas kekuatan nuklir, pangkalan militer dan peralatan tenaga manusia untuk memenuhi persyaratan Perjanjian tentang Angkatan Bersenjata Konvensional di Eropa.

Pada dasawarsa 2000-an, pemerintah mulai condong kepada NATO, dan kerjasama yang mendalam dengan aliansi yang telah disusun oleh Rencana Kerja NATO-Ukraina yang ditandatangani pada tahun 2002. Kemudian disepakati bahwa keinginan bergabung ke dalam NATO hendaklah didahului dengan sebuah jajak pendapat nasional pada masa yang akan datang. Mantan Presiden Viktor Yanukovych memandang cukupnya taraf kerjasama terkini antara Ukraina dan NATO, tanpa perlu menjadi anggota NATO.

Kemajuan organisasi dan pengembangan militer Ukraina (oleh Kementerian Pertahanan) dibagi menjadi tiga periode utama, yaitu ; (1) Periode pertama dimulai dari 1991–1996 – pembentukan awal Angkatan Bersenjata Ukraina, reorganisasi; (2) Periode kedua dari 1997-2000 , organisasi dan pengembangan

lebih lanjut dari Angkatan Bersenjata Ukraina; dan (3) Periode ketiga 2001 tentang reformasi dan pengembangan Angkatan Bersenjata Ukraina, memperkenalkan peralatan militer baru. Aspek-aspek pembangunan periode pertama adalah pembentukan landasan hukum kegiatan militer, penataan kembali strukturnya, pembentukan struktur pelaksana dan pendukung yang sesuai serta unsur-unsur lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsinya.

Perkembangan pertama Angkatan Bersenjata juga dimulai dari pengurangan institusi militer, jumlah personel, dan jumlah persenjataan dan teknologi nuklir. Karena persenjataan dalam jumlah besar tidak diperlukan untuk Ukraina dan tidak dapat dipertahankan dengan anggaran pertahanan yang disediakan.

Pada akhir tahun 1996, lebih dari 3.500 institusi militer yang berbeda dan 410.000 personel dibubarkan. Juga, jumlah persenjataan dan teknologi pertahanan berkurang, pesawat tempur sebanyak 600 unit, helikopter sebanyak 250, tank garnisun dan kendaraan bersenjata tempur sebanyak 2.400 dan 2.000.

Sepanjang tahun 1992–1997 angkatan bersenjata berkurang sebanyak 400.000 prajurit. Lebih dari 1.300 unit, organisasi, instalasi komando dan kontrol dibubarkan selama periode itu. Pada akhir tahun 1999, kekuatan organisasi Angkatan Bersenjata berjumlah sekitar 400.000 orang, termasuk 310.000 militer dan 90.000 penduduk sipil.

Kini, Ukraina secara aktif memberikan dukungan dalam forum dan organisasi internasional, dan juga sebagai salah satu negara yang memberikan dukungan terhadap pemilihan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia pun telah menjadi salah satu kunci partner perdagangan Ukraina di Asia Tenggara. Hasilnya adalah, jumlah perdagangan dua arah telah mendekati 1 miliar USD pada tahun 2017. Kerjasama di luar perdagangan itu meliputi Kerjasama antar parlemen, pariwisata, budaya, dan pendidikan. Kerjasama dengan Ukraina merupakan alur alternatif lain yang memungkinkan bagi Indonesia untuk memperoleh akses terhadap

produk-produk dan teknologi militer Rusia dalam rangka mensiasati pemberlakuan *Counter American Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)* oleh Amerika Serikat (AS) terhadap negara-negara yang dianggap bermusuhan dengan AS (Iran, Korea Utara, dan Rusia)

Pelibatan Militer Dan Sipil Dalam Dihadapkan Dengan Kemungkinan Datangnya Ancaman Dari Luar Negeri.

Pengembangan masa depan negara Ukraina, menurut Kementerian Pertahanan, pihaknya berencana untuk membuat sistem kontrol sipil atas angkatan bersenjata, menjelaskan tugas-tugas pimpinan tertinggi dan masing-masing organisasi negara dan militer dalam hal komando dan kendali Angkatan Bersenjata. Oleh karena itu, Presiden Ukraina, sebagai Panglima Tertinggi dari Angkatan Bersenjata Ukraina, mengeksekusi perintah dan kontrol atas Angkatan Bersenjata sesuai dengan Konstitusi Ukraina dan undang-undang yang aktif.

Komando dan kendali atas Angkatan Bersenjata dan formasi militer lainnya dalam keadaan darurat dilaksanakan oleh Presiden Ukraina melalui markas umum (mirip dengan STAVKA Soviet), salah satu badan kerjanya adalah Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dan Kementerian Pertahanan.

Pada akhir 2005 kementerian pertahanan akan mengurangi strukturnya sebesar 37% dan tenaga kerjanya hampir setengahnya. Ukraina telah mengumumkan tujuan menjadikan tentaranya serba profesional pada tahun 2015. Pada tahap pertama pada tahun 2001 hingga 2005, sekitar sepertiga dari prajurit angkatan darat diganti dengan yang profesional. Selama tahap ketiga (pada tahun 2006 hingga 2010), jumlah profesional yang bertugas di ketentaraan direncanakan meningkat hingga 50%. Dan terakhir, pada tahap terakhir (dijadwalkan selesai tahun 2015), tentara akan menjadi serba profesional. Perampingan tentara akan menyertai transisi ke tentara yang semuanya profesional. Struktur Kementerian Pertahanan Ukraina bertanggung jawab atas pengelolaan pertahanan teritorial, pengembangan militer, mobilisasi jika terjadi perang dan kesiapan tempur.

Staf Umum Ukraina memiliki tugas merencanakan manajemen defensif dan operasional angkatan bersenjata.

Dari beberapa data yang dapat penulis kumpulkan, kemampuan Ukraina yang patut diperhitungkan adalah ; (1) Sampai dengan tahun 1991, Ukraina merupakan bagian dari Federasi Uni Soviet. Ukraina merupakan negara besar di Eropa (603,628 Km2); (2) Kemampuan Industri Pertahanan yang terdukung oleh kegiatan manufacturing lokal yang sangat kuat; (3) Ukroboronprom adalah perusahaan BUMN Ukraina yang menjadi supplier terbesar diantara perusahaan-perusahaan Ukraina untuk kebutuhan domestik Alutsista Ukraina; (4) Di masa Uni Soviet, Ukraina merupakan salah satu pilar industri Alutsista bagi militer Uni Soviet; (5) Pasca Uni Soviet, Rusia masih merupakan salah satu pasar terbesar bagi industri Alutsista Ukraina; dan (6) Pada Tahun 2012, Ukraina tercatat sebagai exportir senjata ke-4 terbesar di dunia mencapai nilai USD\$ 1.344 Billion(SIPRI).

Analisis SWOT Pelibatan Militer Dan Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Ukraina

Internal		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Eksternal	Peluang (O)	so	wo
Aktif dalam forum dan organisasi internasional.	Memiliki Kekuatan dan Kemampuan Militer dan kerjasama dengan forum internasional	Melalui forum Internasional memecahkan konflik bersama	
Ancaman (T)	ST	WT	
Munculnya gerakan separatis yang didukung Moskwa di perbatasan.	Mengatasi permasalahan dengan kekuatan militer	Mengatasi permasalahan dengan kekuatan militer dan forum Internasional	

Berdasarkan teknik analisis SWOT/TOWS di atas, maka strategi “Sinergi Antara Militer Dan Sipil Negara Ukraina Dalam Sistem Pertahanan Guna Menangkal Ancaman Dari Luar Negeri”, berada pada posisi strategi SO. Melalui strategi ini, maka segala kekuatan yang ada harus berkolaborasi dengan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan diantaranya adalah; 1) Dengan kemampuan negara dalam pembangunan aspek militer maka dipersiapkan segala kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan dalam menghadapi segala

kemungkinan ancaman yang datang;dan 2) Memanfaatkan diplomasi secara bilateral dan multilateral dalam menghadapi konflik perang saudara maupun konflik perbatasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pasca bubarunya Uni Soviet, Ukraina mewarisi 1/3 dari keseluruhan fasilitas industri pertahanan Uni Soviet. beberapa lembaga riset Alutsista di Ukraina, baik yang berafiliasi dengan Universitas, seperti *Kozhedub Kharkov University of Air Forces (KhUAF)* dan *Kharkov National University of Radioelectronics (KhNURE)*, melakukan penelitian tentang pengembangan kemampuan Radar, dan tahun 2012, Ukraina menempati peringkat 8-10 eksportir senjata, lebih tinggi dibanding Korea Selatan, Nederland, Turki dan Belarusia..

Sepanjang tahun 1992–1997 angkatan bersenjata Ukraina berkurang sebanyak 400.000 prajurit. Lebih dari 1.300 unit, organisasi, instalasi komando dan kontrol dibubarkan selama periode itu. Pada akhir tahun 1999, kekuatan organisasi Angkatan Bersenjata berjumlah sekitar 400.000 orang, termasuk 310.000 militer dan 90.000 penduduk sipil. Kementerian Pertahanan Ukraina (Verkhovna Rada Ukraine) mengembangkan interoperabilitas dengan kekuatan eksekutif, badan sipil, dan warga sipil serta mengembangkan kondisi untuk kontrol sipil atas Angkatan Bersenjata.

Ukraina telah mengumumkan tujuan menjadikan tentaranya serba profesional pada tahun 2015. Pada tahap pertama pada tahun 2001 hingga 2005, sekitar sepertiga dari prajurit angkatan darat diganti dengan yang profesional. Selama tahap ketiga (pada tahun 2006 hingga 2010), jumlah profesional yang bertugas di ketentaraan direncanakan meningkat hingga 50%. Dan terakhir, pada tahap terakhir 2015 s.d seterusnya, tentara akan menjadi serba profesional.

**Major INF Hadi Mustofa, S.AG., M.M.
adalah Abituren Pendidikan Regular LX
SESKOAD TA 2021**



PERAN PEMERINTAH KAZAKHSTAN DALAM PEMBERDAYAAN KOMPONEN CADANGAN GUNA MENDUKUNG SISTEM PERTAHANAN NEGARA MAYOR LAUT (E) KHARIS NASUTION, S.E., CTMP

PENDAHULUAN

Wilayah Asia Tengah yang berada dalam himpitan Rusia di utara dan Tiongkok di Selatan terdiri dari lima negara yang berada dalam posisi landlocked atau terhimpit daratan dengan tidak adanya akses ke lautan membuat negara-negara tersebut memiliki kerugian strategis dan ekonomis dibandingkan negara-negara yang memiliki akses ke laut. Wilayah Asia Tengah juga mengandung banyak kekayaan alam dan hamparan yang luas, serta berada di „tengah-tengah“ dunia yang pada awal tahun 1900-an disebut oleh McKinder sebagai Heartland dan orang-orang yang dapat menguasai wilayah sekitar Asia Tengah dapat menguasai dunia. Tetapi, Kazakhstan memiliki permasalahan dengan dua negara tetangga. Kazakhstan memiliki kekhawatiran akan ancaman dari utara, yaitu Rusia yang memiliki permasalahan perbatasan, konsentrasi populasi Slav di wilayah utara Kazakhstan, diskursus Rusia mengenai Kazakhstan sebagai ekstensi atau *backyard* dari Rusia, dan kekhawatiran akan adanya ambisi neoimperial Rusia.

Sementara itu, jika dilihat melalui praktik-praktek Kazakhstan yang meliputi administrasi, keamanan, dan pergerakan manusia di perbatasan-perbatasan Kazakhstan, ditemui banyak kasus yang tidak sesuai dengan ide-ide hard borders perbatasan negara yang dikontrol dan dijaga dengan kuat oleh pemerintah yang dituangkan dalam hukum perbatasan Kazakhstan pada tahun 1992. Dalam aspek administrasi dan pemerintahan, Kazakhstan mengadopsi pola sentralisasi yang diawali sejak kemerdekaan Kazakhstan pada tahun 1991. Setelah merdeka, Kazakhstan yang baru mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari Soviet, berusaha memprioritaskan ekonomi daripada politik, sehingga tidak terlalu memusingkan pola pemerintahan dan tetap mengadopsi sistem pemerintahan Uni Soviet, yaitu administrasi yang terpusat. Sehingga isu keamanan merupakan isu penting bagi Kazakhstan yang tidak bisa diabaikan begitu saja mengingat wilayah Kazakhstan yang terkurung daratan, berada di kawasan jalur perdagangan yang strategis dengan dua negara super power sebagai tetangganya.

Untuk meminimalisir masalah keamanan dan batas negara di kawasan asia tengah khususnya untuk negara negara yang baru merdeka maka muncul organisasi internasional bernama SCO.



Peta wilayah negara Kazakhstan

Konsepsi-konsepsi mengenai situasi Kazakhstan membuat kebijakan luar negerinya sebagai refleksi dari posisi geografis negara baru merdeka yang menurut interpretasi Kazakhstan, jalur yang paling cocok untuk ditempuh adalah melalui kebijakan luar negeri yang pragmatis, non-konfrontasional dengan berusaha untuk menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara berkekuatan besar, serta kebijakan yang aktif di wilayah sekitarnya. Hal ini membuat pemerintah Kazakhstan dengan serius mengembangkan kekuatan angkatan bersenjata selaku komponen utama dalam pertahanan negara, namun disaat yang bersamaan pemerintah Kazakhstan menyadari bahwa rakyat merupakan komponen yang penting bagi suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Komponen cadangan pertahanan negara Kazakhstan dibentuk dengan tujuan untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama militer Kazakhstan dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Pembentukannya dilaksanakan berdasarkan kebijakan Presiden dengan tahapan yang meliputi penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh komponen cadangan. Terutama hal ini dibutuhkan pada situasi krisis yang terjadi di Kazakhstan saat ini yang sedang mengalami ancaman nyata, pemerintah mendayagunakan sumber daya nasional yaitu masyarakat sebagai komponen cadangan, menyesuaikan dengan hakikat ancaman atau tantangan yang dihadapi.

Adapun pentingnya penulisan esai ini adalah untuk mengetahui urgensi Kazakhstan dalam pelaksanaan pemberdayaan komponen cadangan pertahanan negara guna mewujudkan pertahanan negara yang kuat dalam menghadapi berbagai bentuk pemberontakan yang mengancam kedaulatan negara. Adapun maksud dan tujuan dari pada penulisan esai ini adalah untuk mengetahui pembentukan komponen cadangan pertahanan Kazakhstan dan memberikan saran serta masukan bagi TNI AD terkait dengan pengembangan komponen cadangan pertahanan negara Indonesia, belajar dari apa yang diketahui melalui pembentukan komponen cadangan pertahanan Kazakhstan. Metode yang digunakan dalam penulisan esai ini adalah metode deskriptif-analisis dengan studi kepustakaan.

Ruang lingkup penulisan esai ini adalah mengenai pemberdayaan komponen cadangan pertahanan Kazakhstan yang akan dibahas dengan berorientasi pada lima persoalan, sebagai berikut: pertama, sejarah singkat angkatan bersenjata Kazakhstan terkait dengan komponen cadangan. Kedua, Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di Kazakhstan. Ketiga, bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan Kazakhstan, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara. Keempat, pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam Kazakhstan. Kelima, saran dan masukan untuk TNI AD terkait dengan komponen cadangan, dimana dalam pembahasan ini penulis akan menggunakan teknik analisa SWOT.

Pembahasan

Secara politis, rakyat adalah semua orang yang berada dan berdiam dalam suatu negara atau menjadi penghuni negara yang tunduk pada kekuasaan negara tersebut. Negara sebagai suatu identitas bersifat abstrak, yang tampak adalah unsur-unsur berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara tersebut, sedangkan warga negara adalah

rakyat yang menetap di suatu wilayah. Dalam konteks hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Maka dari itu pemerintah Kazakhstan juga mempersiapkan kekuatan pertahanan negara yang berasal dari masyarakat sipil.

Sejarah Singkat Angkatan Bersenjata Kazakhstan Terkait Dengan Komponen Cadangan

Angkatan Bersenjata Republik Kazakhstan adalah angkatan bersenjata terpadu dari negara Kazakhstan. Angkatan bersenjata ini terdiri dari pasukan darat, pasukan udara, pasukan angkatan laut, dan garda nasional. Adapun garda nasional merupakan bagian dari angkatan bersenjata yang diisi oleh komponen cadangan pertahanan negara Kazakhstan, yaitu masyarakat sipil. Awal pembentukan angkatan bersenjata Republik Kazakhstan ini adalah dalam peristiwa kemerdekaan Kazakhstan. Kazakhstan merdeka pada tahun 1991 setelah memisahkan diri dari kekaisaran Uni Soviet. Tokoh utama di balik kemerdekaan Kazakhstan ini adalah Nursultan Nazarbeyev yang menjadi presiden pertama Kazakhstan.



Nursultan Nazarbeyev

Dengan menyadari bahwa masyarakat merupakan komponen yang tidak terpisah dari kekuatan pertahanan negara Kazakhstan, maka pemerintah Kazakhstan semakin serius untuk memberdayakan kekuatan komponen cadangan, yaitu masyarakat sipil, untuk mengoptimalkan pertahanan negara. Hal ini juga didukung oleh arah kebijakan luar negeri Kazakhstan yang memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan stabilitas geopolitik dan keamanan regional.

Inovasi lainnya, Kazakhstan ingin membangun kekuatan militer yang mampu memproyeksikan kekuatan di kawasan Asia Tengah, dengan mengkombinasikan kekuatan militer dan kekuatan sipil yang disebut sebagai komponen cadangan.

Sesuai dengan strategi pertahanan dan mempertimbangkan kondisi geografisnya, Kazakhstan lebih menitikberatkan pertahanannya ke wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik dan sengketa dengan negara tetangga. Karena itu pasukan angkatan darat lebih banyak disebar di pos-pos yang berbatasan langsung dengan wilayah internasional, dibantu dengan masyarakat yang hidup di sekitar wilayah tersebut.

Sistem Rekrutmen Komponen Cadangan untuk Kepentingan Pertahanan di Kazakhstan

Upaya untuk mempertahankan negara merupakan tugas militer sebagai komponen utama, yang disebut sebagai tentara Kazakhstan, namun demikian upaya bela negara dapat dilakukan melalui berbagai profesi yang disandang oleh masing-masing warga negara. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

Kazakhstan sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki komponen cadangan sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Hal ini dibentuk untuk bersiap tanpa menunggu ancaman tiba di depan mata, di tengah ancaman *proxy* yang kini meluas keberbagai negara di dunia. Kazakhstan mengupayakan dengan keras agar pertahanannya mampu bertahan dari segala bentuk ancaman kedepan. Untuk menghasilkan penyelenggaraan sistem pertahanan negara yang efektif dan efisien, maka komponen cadangan menjadi prioritas.

Pemerintah Kazakhstan mengerahkan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang disiapkan dan dikerahkan melalui mobilisasi. Anggota yang dikerahkan mencakup pegawai negeri sipil, pekerja/buruh yang telah memenuhi sejumlah persyaratan.

Sistem rekrutmen komponen cadangan pertahanan Kazakhstan dikoordinir langsung oleh Kementerian Pertahanan Kazakhstan yang terlebih dahulu diawali dengan membuka seleksi pendaftaran program komponen cadangan bagi masyarakat sipil.

Selanjutnya, para komponen cadangan yang lolos beragam seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan Kazakhstan akan langsung menerima pelatihan dalam kurun waktu yang ditentukan. Jika proses rekrutmen sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Kazakhstan, maka untuk pelatihan akan sepenuhnya dilakukan oleh tentara Kazakhstan.

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di Kazakhstan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara, sehingga dalam sistem rekrutmennya sangat berorientasi pada skala prioritas agenda reformasi sektor keamanan terutama pembangunan militer Kazakhstan sebagai komponen utamanya.



Angkatan bersenjata Kazakhstan

Alutsista merupakan perlengkapan yang menandai kekuatan jenis alat tempur yang dimiliki negara dan personel adalah kekuatan utama dan kekuatan cadangan yang dimiliki negara.

Kekuatan utama terletak pada kuantitas dan kualitas pasukan militernya sedangkan kekuatan cadangan adalah jumlah rakyatnya yang mampu membela negara, karena itu, kekuatan Alutsista dan kekuatan personil sangat menentukan efektifitas pertahanan terhadap ancaman lawan yang mengganggu dan merusak kondisi aman dan stabilitas negara.

Oleh sebab itulah kepentingan nasional melalui instrumen modernisasi kekuatan komponen cadangan adalah salah satu bentuk *power* bagi negara untuk bertahan dalam struktur internasional yang anarkis.

Bentuk Organisasi dan Penggunaan Komponen Cadangan dalam Sistem Pertahanan Kazakhstan, Dihadapkan Datangnya Ancaman dari Luar Negara

Keberadaan komponen cadangan sangat penting dalam sistem kemiliteran suatu negara. Komponen Cadangan di Kazakhstan saat ini telah disebut sebagai tentara rakyat, dengan kejelasan tugas yaitu untuk membantu komponen utama menghadapi ancaman-ancaman tertentu. Keberadaan komponen cadangan dalam konteks pertahanan negara menjadi hal yang secara bertahap wajib ada. Karenanya, pemerintah Kazakhstan melalui kementerian Pertahannya memiliki kepentingan untuk menyiapkan wadah bagi perkuatan komponen cadangan bagi komponen utama pertahanan Negara.

Di Kazakhstan komponen cadangan secara khusus dibentuk tidak terpisah dengan komponen utama, dengan kualifikasi untuk dapat bergabung dalam dan menjalankan fungsi seperti komponen utama, sehingga mereka mendapatkan pembinaan militer yang sesuai dengan kebutuhan komponen utama. Selain itu, komponen cadangan ini bergabung dengan proses rekrutmen melalui pendaftaran atau aplikasi, wajib militer, atau otomatis diambil dari mantan prajurit dan kekuatan-kekuatan yang sudah siap, namun demikian tidak ada pilihan bagi warga sipil Kazakhstan untuk menolak keterlibatan dirinya sebagai komponen cadangan, karena kondisi Kazakhstan yang saat ini sedang mengalami berbagai macam konflik dan krisis.

Ada tiga alasan mengapa komponen cadangan menjadi kebutuhan penting dalam perkuatan pertahanan Negara, yaitu: Pertama, komponen cadangan merupakan upaya untuk mewujudkan arah kebijakan nasional Kazakhstan untuk menjadi penguasa, sehingga keberadaan komponen cadangan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan Negara, di samping komponen utama.

Kedua, karakter ancaman terhadap kedaulatan Negara makin kompleks. Ancaman, baik yang bersifat militer maupun nir-militer makin kompleks. Perkuatan personil dan kemampuan pada komponen cadangan menjadi salah satu dari sejumlah langkah dalam mengantisipasi berbagai ancaman tersebut. Ketiga, perkuatan pertahanan negara dengan pendekatan pada pelibatan kekuatan komponen cadangan menjadi pilihan Kazakhstan guna melibatkan segenap potensi rakyatnya dalam menjaga dan menpertahankan kedaulatan.

Pola Pembinaan dan Pemeliharaan Kemampuan Komponen Cadangan untuk Kepentingan Pertahanan Kazakhstan

Komponen Cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Sumber daya manusia sebagai komponen cadangan, berhak atas bela negara sekaligus harus memiliki rasa cinta terhadap negaranya. Kazakhstan merekrut komponen cadangannya hampir dua atau tiga kali jumlah pasukan regulernya, akan tetapi tidak melebihi jumlah personil regulernya. Dalam pengertian bahwa komponen cadangan merupakan pendukung dari tugas dan fungsi komponen utama. Hal utama yang membedakan antara komponen utama dan komponen cadangan adalah pada keberlangsungannya dalam menjalankan peran dan fungsinya. Sekedar ilustrasi, seseorang yang menjalani kontrak sebagai personil komponen cadangan akan memiliki batas waktu yang terbatas dibandingkan dengan personil yang regular.

Apabila digambarkan secara umum, tentara cadangan di Kazakhstan akan menjalani masa bakti selama waktu yang ditentukan, dan selanjutnya dapat diperpanjang setelah masa bakti sebelumnya telah berakhir. Selama masa bakti tersebut berlangsung dilakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki.

Adapun pembinaan merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan

pengetahuan, pendidikan, dan/atau pelatihan kepada sipil Kazakhstan guna menumbuh kembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah. Pembinaan komponen cadangan pertahanan Kazakhstan ditujukan untuk meningkatkan mobilisasi, yaitu tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak Sumber Daya Nasional serta Sarana dan Prasarana Nasional yang telah dipersiapkan dan dibina sebagai komponen kekuatan Pertahanan Negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta kelangsungan hidup negara.

Dalam rangka melaksanakan sistem pertahanan negara Indonesia yang bersifat semesta, akan melibatkan seluruh sumber daya nasional. Komponen cadangan sebagai bagian dari sumber daya nasional perlu dibangun, dipelihara dan dikembangkan agar kesiapannya dapat terwujud sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama pertahanan negara Kazakhstan. Pembinaan komponen cadangan meliputi pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan.

Selanjutnya pasis melakukan analisis SWOT yang dilakukan dengan memperhitungkan setiap aspek sesuai tabel berikut :

ANALISIS SWOT

FAKTOR INTERNAL	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
FAKTOR EKSTERNAL	<ul style="list-style-type: none"> - Kazakhstan memiliki jumlah penduduk yang banyak - Penduduk dengan jiwa nasionalisme yang tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kazakhstan berada dalam posisi terhimpit daratan, tidak adanya akses ke lautan memiliki kerugian strategis dan ekonomis.
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi SO <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kekuatan militer dan kekuatan sipil yang disebut sebagai komponen cadangan. - Mengkombinasikan kekuatan militer dan sipil 	Strategi WO <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan komponen cadangan untuk dijadikan militer khususnya angkatan laut.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi ST <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki permasalahan perbatasan dengan Rusia. - memanfaatkan komponen cadangan dalam mengadapi permasalahan perbatasan di bagian utara dengan Rusia. 	Strategi WT <ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan komponen cadangan dalam rangka pertahanan negara.

Untuk menguji validitas analisis SWOT terhadap faktor-faktor dari peran pemerintah Kazakhstan dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap komponen cadangan untuk mendukung sistem pertahanan negara ditemui bahwa strategi yang terpilih adalah strategi Kelemahan – Ancaman atau (W-T) memanfaatkan berbagai kelemahan internal untuk mengurangi ancaman dari luar. Dari hasil analisis SWOT tersebut juga ditemui bahwa posisi strategi terpilih adalah strategi W - T yaitu dalam rangka menghadapi kekhawatiran Rusia dengan neoimperial serta posisi Kazakhstan yang tidak memiliki akses laut namun telah memiliki kekuatan angkatan laut maka Kazakhstan dapat mengoptimalkan kekuatan tersebut dengan kekuatan sipil melalui pembinaan upaya bela negara dalam rangka pertahanan negara.



Angkatan bersenjata Kazakhstan

Penutup

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Kazakhstan sebagai negara berkekuatan besar dan keinginan untuk mengimbangkan kekuatannya di kawasan Asia Tengah dituntut untuk meningkatkan pemberdayaan kekuatan pertahanan nasionalnya guna menjamin terciptanya kondisi dunia yang ditandai dengan stabilitas keamanan. Menyadari akan posisinya sebagai negara yang memiliki keinginan untuk menguasai kawasan Asia Tengah dengan ancaman yang terjadi di kawasan, maka Kazakhstan terus melakukan pemberdayaan terhadap komponen cadangan pertahanan negaranya.

Disisi lain pemerintah Kazakhstan juga menyadari bahwa Alutsista merupakan perlengkapan yang menandai kekuatan jenis alat tempur yang dimiliki negara dan personil adalah kekuatan utama dan kekuatan cadangan yang dimiliki negara.

Kekuatan utama terletak pada kuantitas dan kualitas pasukan militernya sedangkan kekuatan cadangan adalah jumlah rakyatnya yang mampu membela negara, karena itu, kekuatan alutsista dan kekuatan personil sangat menentukan efektifitas pertahanan terhadap ancaman lawan yang mengganggu dan merusak kondisi aman dan stabilitas negara. Oleh sebab itulah kepentingan nasional melalui instrumen modernisasi kekuatan komponen cadangan adalah salah satu bentuk power bagi negara untuk bertahan dalam struktur internasional yang anarkis.

Adapun pelajaran yang dapat diambil sebagai saran dan masukan untuk Kementerian Pertahanan dan TNI AD dalam mengoptimalkan pemberdayaan komponen cadangan untuk mendukung tugas dalam menjaga pertahanan negara adalah dengan menyadari akan posisi Indonesia yang rawan terhadap ancaman baik dari internal maupun eksternal, penting untuk melakukan optimalisasi pemberdayaan terhadap komponen cadangan pertahanan negaranya. Pelibatan sumber daya manusia meliputi pelibatan kekuatan dan pembinaan kemampuan. Pertama, pelibatan kekuatan yang diharapkan dari sumber daya manusia adalah mampu meningkatkan kemampuan komponen cadangan yang akan digunakan pada saat mendukung operasi di daerah rawan konflik sesuai pemetaan komponen utama serta dapat meningkatnya kualitas kesadaran bela negara dengan jumlah yang proporsional. Kedua, pelibatan kemampuan yang diharapkan adalah sumber daya manusia yang tersedia memiliki kemampuan sesuai dengan profesi masing-masing dan searah dengan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan komponen utama dengan merekrut warga negaranya sebagai komponen cadangan untuk menjadi prajurit dengan cara dididik dan dilatih dalam rangka menghadapi berbagai ancaman.

**Major Laut (E) Kharis Nasution, S.E., CTMP
adalah Abituren Pendidikan Regular LXI
SESKOAD TA 2021**



PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SEBAGAI KOMPONEN CADANGAN KONGO GUNA MEREDAM KONFLIK NEGARANYA

MAYOR PAS AGUS M. ARIF H. A.

PENDAHULUAN

Republik Demokratik Congo negara yang terletak di Afrika Tengah. Secara resmi dikenal sebagai Republik Demokratik Congo, RDC beribukota Kinshasa yang terletak di Sungai Congo. Kinshasa merupakan Kota terbesar di Afrika Tengah, kota tersebut berfungsi sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan budaya resmi negara. Negara Congo ini sering disebut dengan singkatan DRC (*Democratic Republic Congo*) atau disebut Congo (Kinshasa), untuk membedakannya dengan Republik Congo lainnya, yang secara resmi bernama Republik Congo dan sering disebut sebagai Congo (*Brazzaville*). Congo merdeka dari Belgia pada tahun 1960. Dari 1971-1997 negara ini mempunyai nama resmi Republik Zaire, perubahan yang dibuat oleh penguasa saat itu yaitu Jenderal Mobutu Sese Seko. Nama "Zaire" adalah istilah yang berarti "sungai besar" dalam bahasa Afrika lokal, seperti nama negara saat itu yang mengacu pada Sungai Congo. Namun setelah penggulingan Mobutu pada tahun 1997, nama Republik Demokratik Congo, diangkat kembali. Dan kemudian Congo terjun ke perang sipil yang menghancurkan Negara tersebut.

Negeri di jantung Afrika ini dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah yang cukup membanggakan negara tersebut, memiliki

industri terbesar seperti berlian, kobalt, dan tembaga, selain itu Congo merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan hutan terbesar di Afrika, dan menjadi potensi tenaga air setengah dari benua Afrika. Sumber daya alam ini apabila dikelola dengan baik tentunya akan menjadi komponen cadangan yang mampu mendukung komponen utama Congo.

Namun semenjak merdeka dari Belgia pada tahun 1960, Congo lebih dikenal karena perang dan pemerintahan yang diktator. Upaya-upaya untuk memperkenalkan demokrasi di negeri ini dimulai awal 1990-an sesudah kekuasaan diktator Mobutu sese seko berakhir, namun dua perang dalam satu dekade terakhir telah mencabik-cabik negeri itu. Sentimen pramodial kesukuan yang tampaknya semakin jauh mendorong Republik Demokratik Congo ke dalam bahaya perpecahan yang lebih parah, sehingga warga negara Congo sebagai komponen cadangan tidak bisa diberdayakan secara optimal untuk memperkuat pertahanan negara dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Congo.

Keganasan dan kebuasan pertikaian etnis tersebut tidak hanya meminta korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan kerugian harta benda yang tidak sedikit, berbagai bangunan, sarana prasarana hancur, milisi suku-

suku yang bertikai cenderung bertindak brutal, melaksanakan pemerkosaan, perampukan dan pembunuhan secara sadis. Pertikaian etnis di RDK bertambah merisaukan karena cenderung meluas ke daerah lainnya. Pemerintah RDK dibuat frustasi karena pertikaian yang terjadi hanya membuat lebih parah pertikaian primordial yang sudah melanda setengah wilayah negeri terluas di Afrika Tengah ini.



Peta wilayah negara Kongo

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi persoalan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana sejarah singkat angkatan bersenjata negara Kongo terkait dengan komponen cadangan? (2) Bagaimana sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kongo? (3) Bagaimanakah bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kongo, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negara Kongo? (4) Bagaimanakah pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan dalam negara Kongo? Berdasarkan identifikasi persalan tersebut, maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah : Bagaimana mengelola sumber daya alam Kongo sebagai komponen cadangan guna meredam konflik negaranya?.

Selanjutnya nilai guna tulisan singkat ini adalah sebagai lesson learned bagi Komando Atas dari pengelolaan komponen cadangan yang dilakukan di negara Kongo. Adapun metode yang diterapkan dalam tulisan singkat ini merupakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi kepustakaan dan berdasarkan pengalaman penulis selama bertugas sebagai Prajurit TNI.

Maksud tulisan ini adalah memberikan gambaran tentang sumber daya alam Kongo sebagai komponen cadangan dalam rangka pertahanan negaranya. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui penyiapan sumber daya alam Kongo sebagai komponen cadangan dalam rangka pertahanan negaranya dengan ruang lingkup tulisan meliputi pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Tulisan ini dibatasi pada pembahasan tentang sumber daya alam Kongo sebagai salah satu komponen cadangan yang dikelola oleh pemerintah Kongo guna meredam konflik di negaranya.

Pembahasan

Republik Demokrasi Kongo merupakan wilayah yang kaya akan barang tambang, seperti minyak mentah, berlian, coltan, dan tembaga. Wilayah ini juga memiliki tanah yang subur dan baik digunakan untuk perkebunan. Republik Demokrasi Kongo juga merupakan wilayah hutan hujan alami, bahkan merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia. Namun ironisnya Republik Demokrasi Kongo malah merupakan negara yang memiliki pendapatan nasional per-kapita rendah, hanya sebesar US\$ 484,2 pada tahun 2013. Menjadikan negara ini menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Kongo merupakan sebuah negara di Afrika yang terkenal akan sumber daya mineralnya. Hal itu dibuktikan dengan video yang viral beberapa waktu lalu. Pada video tersebut terlihat warga Kongo memperebutkan emas dari sebuah gunung yang memiliki kandungan emas tinggi. Itu menyebabkan video tersebut viral di dunia. Sumber daya mineral milik Kongo tersebut ternyata tidak selalu berdampak baik. Itu justru menimbulkan kerugian besar bagi negara Kongo sendiri. Itu menimbulkan konflik berkepanjangan dan penjualan emas secara ilegal yang dilakukan kelompok bersenjata di Kongo. Konflik kemudian menjadi perang terbuka dengan adanya campur tangan negara tetangga yaitu Angola, Burundi, Rwanda dan Uganda dan dikenal dengan Perang Kongo I. Keterlibatan negara ini dikarenakan adanya kepentingan sumber daya alam, dukungan terhadap etnis Tutsi, dan ketidaksukaan negara-negara.

Sejarah singkat angkatan bersenjata negara Kongo terkait dengan komponen cadangan diawali sejak mendapatkan kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Angkatan Bersenjata Kongo berupaya mengatasi berbagai konflik dan pemberontakan warga negaranya, dimana warga negara tersebut seharusnya disiapkan untuk komponen cadangan guna memperkuat pertahanan negaranya setelah memperoleh kemerdekaan dari Belgia. Namun di awal kemerdekaannya, Kongo sering diwarnai konflik antar etnis maupun konflik politik di Republik Demokratik Congo (DRC).

Konflik-konflik yang terjadi dalam bentuk perang antar etnis, Pemberontakan, kudeta militer, dan gangguan keamanan yang dilakukan oleh milisi-milisi bersenjata terhadap masyarakat. Konflik yang baru saja terjadi adalah pemberontakan "Gerakan M23" di wilayah Timur DRC khususnya di provinsi North Kivu. Pemberontakan ini telah berhasil menguasai ibu kota provinsi North Kivu yaitu kota Goma. Pemberontak "Gerakan M23" tidak hanya menyerang pasukan angkatan bersenjata Republik Demokratik Congo (FADRC), tetapi juga menyerang pasukan penjaga perdamaian dan keamanan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi yang bernama "*Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en République D.R.Congo*" (MONUSCO). Munculnya pemberontakan M23 di timur DRC, menarik kembali perhatian internasional di daerah konflik yang kompleks tersebut.



Angkatan Bersenjata Republik Demokratik Congo (DRC)

Meskipun angkatan bersenjata DRC telah melaksanakan tindakan penumpasan dengan resistensi yang kuat, kekuatan kelompok ini terus berkembang dengan melaksanakan koalisi dengan kelompok bersenjata lainnya di

wilayah tersebut dan mengakibatkan kekalahan yang memalukan bagi angkatan bersenjata negara itu.

Sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kongo belum berjalan optimal dikarenakan sering terjadinya pemberontakan dan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini. Sejak tahun 1996, Republik Demokrasi Congo mengalami konflik yang tidak kunjung usai. Diawali dengan Perang Kongo pertama yang merupakan sebuah upaya kudeta atas rezim Mobutu yang diktator. Dilanjutkan dengan perang kongo kedua yang merupakan upaya kudeta pula atas pemerintahan Laurent Kabila. Perang tersebut secara resmi berakhir pada tahun 2003, sesudah disepakati perjanjian damai Lusaka dan *Accord Global et Inclusif (AGI)*. Akan tetapi konflik dan kekerasan di DRC masih berlangsung hingga saat ini. Disebut-sebut sebagai perang dunia pertama di Afrika, konflik di DRC ini memakan jutaan korban jiwa dan menyebabkan jutaan lainnya mengungsi.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kongo, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negeri Kongo adalah melalui reformasi keamanan. Ketersediaan keamanan yang memadai merupakan hal yang penting dalam manajemen konflik. Ini salah satu alasan mengapa komunitas internasional fokus dalam mereformasi sektor keamanan untuk mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas dalam pandangan masyarakat. Jika sektor keamanan tidak diperbaiki secara baik atau tidak bekerjasama dalam proses mekanisme pengembangan dialog politik, mereka bisa saja menjadi kekuatan tersendiri. Dan dalam skenario terburuk ketika mereka berada dalam lingkaran luar politik mereka akan mampu mengendalikan masyarakat sipil.

Cadangan mineral merupakan bagian dari komponen cadangan sekaligus sumber daya ekonomi utama negara Kongo. Pertambangan di negara itu menghasilkan hampir sembilan per sepuluh dari total ekspor. Kelimpahan mineral di provinsi Katanga merupakan salah satu faktor yang menarik negara Eropa ke Kongo pada abad ke-19.

Selain emas, mineral yang ditemukan di Katanga antara lain tembaga, kobalt, seng, kasiterit (sumber utama timah logam), mangan, batubara, perak, kadmium, dan germanium (elemen rapuh yang digunakan sebagai semikonduktor). Di antara sederet negeri Afrika yang dikaruniai sumber daya alam berlimpah, Republik Demokratik Congo sangat berpotensi menjadi negara terkaya di muka bumi. Sungai Congo menyandang predikat berlapis: terpanjang kedua di Afrika setelah sungai Nil di Mesir, terbesar kedua di dunia setelah sungai Amazon, dan terdalam di dunia mencapai lebih dari 220 meter. Ditunjang iklim tropis dan tipikal hutan hujan lebat, rakyat Congo seharusnya tidak kekurangan sumber air bersih dan segala aktivitas kehidupan dasar lainnya. Selain diberkahi kesuburan, tanah Congo juga mengandung banyak sekali kekayaan alam bernilai mahal. Emas dan koltan yang terkandung dalam komponen sirkuit elektronik telepon genggam dan komputer salah satunya berasal dari Congo. Produksi uranium Congo juga tersohor, termasuk yang dipakai untuk meracik bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Beberapa produk mineral lainnya seperti berlian, kobalt, koltan hingga minyak bumi menambah kekayaan tanah yang dulunya bernama Zaire ini.

Namun sebagai akibat pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan di bidang sumber daya alam untuk kepentingan pertahanan negara Congo yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kekayaan sumber daya alam Congo ternyata tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Alih-alih berkubang uang dan hidup mapan, berbagai jenis mineral berharga ini malah mendatangkan penderitaan berupa kolonialisme dan konflik bersenjata. Situasi perebutan sumber daya alam yang bermula di bawah kolonialisme Belgia, terus berlanjut hingga hari ini. Berita-berita yang keluar dari Congo lebih sering menampilkan wajah perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kediktatoran hingga korupsi. Dilansir dari AFP, kobalt adalah salah satu mineral yang dipakai untuk produk baterai berteknologi tinggi.

Mineral ini tersemat dalam baterai ponsel keluaran iPhone hingga mobil listrik Tesla. Dalam dua tahun terakhir, harganya sudah mencapai 81.500 dolar per ton. Dengan predikat pemasok dua pertiga kobalt untuk pasar global, para penambang Congo menjual biji kobalt berkualitas tinggi hanya sekitar 7.000 dollar per ton. Mereka seperti tak menyadari betapa harga kobalt tengah meroket. Praktik penambangan kobalt di Congo sering mendapat kritik dari kalangan LSM lantaran melibatkan para pekerja anak-anak dan dengan kondisi kerja yang berbahaya. Laporan Amnesty Internasional pada November 2017 menyebutkan bahwa hampir separuh dari 28 perusahaan besar dunia termasuk Microsoft, Renault dan Huawei telah gagal membuktikan bahwa mereka tak meraup keuntungan dari penderitaan para pekerja anak di Congo. Laporan Amnesty Internasional lainnya menyebutkan sekitar 100 ribu sampai 150 ribu orang bekerja di tambang kobalt Congo. Jumlah tersebut sudah termasuk anak-anak.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana uraian di atas, maka permasalahan komponen cadangan di Congo dapat dianalisa dengan memakai analisa SWOT guna menemukan hal-hal yang penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi pemerintah Congo berhubungan dengan dengan pengelolaan komponen cadangan di Congo, dengan tabel analisis SWOT sebagai berikut :

	STRENGHT	WEAKNESS
INTERNAL	- Kesiapan Ops Komcad	- Termasuk negara termiskin di dunia
EKSTERNAL	- Adanya sumber daya alam yang melimpah	- SDA dijual dengan harga murah di pasar dunia
OPPORTUNITY	- Cadangan mineral adalah sumber daya ekonomi utama Congo.	- SDM tidak mampu mengelola SDA Congo secara optimal
STRATEGI SO	Memberdayakan komponen cadangan sumber daya alam dengan dukungan PBB	Bangkit dari kemiskinan dengan dukungan pasukan perdamaian PBB
THREATS	- Kehadiran pasukan perdamaiannya PBB di Congo	STRATEGI WT
STRATEGI ST	- Konflik dan kekerasan masih sering terjadi di Congo	Meningkatkan kualitas intelektualitas SDM untuk mengelola SDA guna menghentikan konflik dalam rangka mendukung pertahanan negara Congo.
	- perang sipil antara pemerintah dan kelompok bersenjata, kediktatoran hingga korupsi	

Dengan memperhatikan tabel analisis SWOT di atas, maka prosedur pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari faktor internal (*strength* dan *weakness*) dan eksternal (*opportunity* dan *threats*), digunakan untuk menentukan dan menganalisis pengelolaan komponen cadangan di Kongo guna mendukung kepentingan pertahanan negaranya.

Pengelolaan sumber daya alam Kongo sebagai komponen cadangan guna meredam konflik negaranya adalah dengan meningkatkan kualitas intelektualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam cadangan melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan didukung pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan terarah guna mendukung kepentingan pertahanan negara Kongo dihadapkan pada seringnya terjadi konflik di Kongo yang mengakibatkan keresahan dan kemiskinan di kalangan penduduk sipil Kongo.

Penutup

Mengalir dari uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sejarah singkat angkatan bersenjata negara Kongo terkait dengan komponen cadangan diawali sejak mendapatkan kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, Angkatan Bersenjata Kongo berupaya mengatasi berbagai konflik dan pemberontakan warga negaranya, dimana warga negara tersebut seharusnya disiapkan untuk komponen cadangan guna memperkuat pertahanan negaranya setelah memperoleh kemerdekaan dari Belgia. Sehingga sistem rekrutmen komponen cadangan untuk kepentingan pertahanan di negara Kongo belum berjalan optimal dikarenakan sering terjadinya pemberontakan dan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini.

Bentuk organisasi dan penggunaan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara Kongo, terutama ketika dihadapkan dengan datangnya ancaman dari luar negeri Kongo adalah melalui reformasi keamanan. Ketersediaan keamanan yang memadai merupakan hal yang penting dalam manajemen konflik. Ini salah satu alasan mengapa komunitas internasional fokus dalam

mereformasi sektor keamanan untuk mengembalikan kepercayaan dan kredibilitas dalam pandangan masyarakat. Selain diberi kesuburan, tanah Kongo juga mengandung banyak sekali kekayaan alam bernilai mahal. Namun sebagai akibat pola pembinaan dan pemeliharaan kemampuan komponen cadangan (di bidang sumber daya alam) untuk kepentingan pertahanan negara Kongo tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kekayaan sumber daya alam Kongo ternyata tak berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya.

Dengan demikian, kesiapan sumber daya alam Kongo sebagai komponen cadangan dalam rangka pertahanan negaranya adalah dengan meningkatkan kualitas intelektualitas sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam cadangan melalui pendidikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan didukung pengelolaan sumber daya alam yang terpadu dan terarah guna menyelesaikan konflik yang sering terjadi dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara Kongo.

Adapun saran dan masukan terkait dengan komponen cadangan tersebut adalah agar pemerintah Kongo lebih fokus mensejahterakan rakyatnya dengan memanfaatkan dan memberdayakan komponen cadangan berupa sumber daya alam yang melimpah melalui pendekatan dan reformasi keamanan karena ketersediaan keamanan yang memadai merupakan hal yang penting dalam manajemen konflik.

Selanjutnya *lesson learned* yang dapat diambil adalah agar Indonesia lebih teliti dan hati-hati serta waspada dalam mengelola SDA sebagai bagian dari komponen cadangan dan sebagai wujud cinta tanah air guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang erat dalam rangka mendukung kepentingan pertahanan negara Indonesia.

**Mayor Pas Agus M. Arif H. A. adalah
Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD
TA 2021**



SISTEM PERTAHANAN NEGARA ARAB SAUDI DALAM MENGHADAPI ANCAMAN DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI

MAYOR CPL ADI YUSUP KESUMA JAYA, B.SC.

PENDAHULUAN

Islam merupakan aspek penting dalam melihat perubahan politik di Timur Tengah. Imperialisme Barat telah mengubah sistem dan struktur politik di Timur Tengah. Saat Timur Tengah memasuki era modern, pengaruh Barat menjadi dominan. Ini terjadi karena kolonialisasi Barat tidak hanya bertujuan untuk menguasai sumber daya alam, tetapi juga melemahkan sistem politik di Timur Tengah agar sejalan dengan kepentingan Barat. Pada awal kemerdekaan negara mereka, para penguasa Timur Tengah tidak hanya pro-Barat, tetapi juga berusaha menerapkan sekularisme secara radikal. Akibatnya, demi mempertahankan kekuasaan mereka, para rezim menjadi otoriter dan tidak memberikan ruang kebebasan kepada rakyatnya. Rakyat Timur Tengah hidup terkekang, mengalami kemunduran ekonomi, sementara para penguasa menikmati kehidupan mewah.

Kemunculan politik berbasis agama yang terjadi di sejumlah negara Timur Tengah setelah *Arab Spring*, tidak lepas dari peran kelompok Islam untuk menunjukkan eksistensinya di tengah kegagalan sistem politik, sosial dan

ekonomi yang dibangun rezim penguasa. Oleh karena itu, dalam wacana politik Timur Tengah kontemporer, Islam dipandang sebagai sebuah keyakinan yang mengilhami berbagai lapisan masyarakat serta berhasil mentransformasikan nilai-nilai sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan bernegara. Bahkan, sejumlah pemerintahan monarki tertarik menggunakan Islam untuk melegitimasi kebijakannya, baik dalam politik, hukum, maupun ekonomi. Para penguasa di Arab Saudi berusaha mendekatkan simbol Islam untuk melegitimasi kekuasaan. Contohnya, monarki dan ulama Wahabi sebagai dua kekuatan yang saling mendukung di Arab Saudi. Arab Saudi merupakan negara monarki absolut hingga 1992, otoritas kerajaan memperkenalkan konstitusi negara pertama dengan sistem hukum yang didasarkan pada hukum Islam (syariat). Sejak terjadinya Perang Teluk 1991 dan dimulainya Operasi Badai Gurun oleh Amerika Serikat, Kerajaan Arab Saudi harus berhadapan dengan tumbuhnya gerakan Islam yang menginginkan adanya perubahan dalam berbagai segi kehidupan.

Melalui gerakan reformasi keagamaan, kekuatan politik Islam seperti gerakan As-Sahwah Al-Islamiyyah merupakan representasi dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang menunjukkan diri mereka sebagai kelompok oposisi yang mengkritik pemerintah dan bahkan mempertanyakan legitimasi keislaman pihak kerajaan.

Pertahanan negara merupakan salah satu konsekuensi dari keberadaan sebuah negara, sehingga menjadi gejala universal dan perhatian semua negara. Terkait dengan kedaulatan negara, keselamatan bangsa serta persatuan nasional, konsekuensi juga mengandung sejumlah konsekuensi seperti pertahanan yang lemah, intervensi, penjajahan atau pendudukan negara lain. Cara yang dilakukan untuk menghindari kemungkinan sejumlah konsekuensi terhadap semua negara di dunia, tidak terkecuali negara yang sedang melakukan penjajahan atau pendudukan, harus memperhatikan hal yang berkaitan dengan masalah politik pertahanan negara. Sistem Pertahanan Nasional Arab Saudi diorganisir berdasarkan prinsip esensial pertahanan diri yang sah: menangkis setiap agresi militer eksternal untuk menjamin kebebasan rakyat, kedaulatan nasional, dan integritas territorial. Misi sekundernya termasuk berkomitmen pada operasi multinasional dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, berpartisipasi dalam misi dukungan internal, membantu negara-negara sahabat, dan membangun sistem pertahanan sub-regional.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih memahami sistem pertahanan negara Arab Saudi perlu dilakukan identifikasi pokok-pokok persoalan sebagai berikut : 1) Bagaimanakah sistem pertahanan Negara Arab Saudi?. 2) Bagaimanakah bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi?. 3) Bagaimanakah bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem Pertahanan negara Arab Saudi, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri? Berdasarkan identifikasi pokok-pokok persoalan tersebut, maka rumusan permasalahannya adalah : "Bagaimana Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi dalam

menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri ?".

Pentingnya pembahasan Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri, diarahkan pada tinjauan upaya optimalisasi sistem pertahanan negara Indonesia, walaupun secara anggaran dan kondisi Geografi, Demografi dan Kondisi sosial yang berbeda. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analisis dan studi pustaka yang bersumber dari buku-buku, kajian ilmiah serta informasi dari situs internet yang relevan dengan pembahasan yang digunakan dalam penulisan esai ini.



Peta wilayah negara arab saudi

Nilai guna dari tulisan ini mendorong para pembaca agar memahami tentang Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Esai ini dibuat dengan maksud memberikan gambaran mengenai Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri yang bertujuan sebagai sumbang saran pemikiran kepada komando atas dikaitkan dengan Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi. Penulisan ini dibatasi pada Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri dengan Ruang lingkup dalam penulisan esai ini meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup.

Pembahasan

Arab Saudi adalah negara yang menganut sistem monarki kerajaan yang terletak di Teluk Persia, merupakan negara terbesar di Timur Tengah, menempati 80 persen dari Jazirah Arab. Negara ini memiliki perbatasan dengan Irak, Kuwait, Yordania, Yaman dan Oman. Sebagian besar negara ini gurun atau semi-gurun, meskipun garis pantai barat di

sepanjang Laut Merah memiliki areal hutan. Arab Saudi memiliki sejarah yang panjang karena lokasinya yang strategis di dekat rute perdagangan utama dan paling dikenal sebagai tempat kelahiran nabi umat Islam, Muhammad. Kota-kota besar di negara ini termasuk Mekah dan Madinah, di mana jutaan peziarah Muslim mengunjunginya setiap tahun dalam rangka menunaikan ibadah umrah dan berhaji. Dengan 25 persen dari cadangan minyak dunia, negara ini adalah salah satu negara terkaya di dunia dan memiliki infrastruktur yang modern. Arab Saudi sebagian besar memiliki iklim gurun, dengan suhu tinggi siang hari dan suhu yang lebih rendah pada malam hari. Di Riyadh, tinggi suhu rata-rata 43 derajat C dan suhu rendah rata-rata 29 derajat C pada bulan Juli, sedangkan rata-rata tinggi suhu udara adalah 19 derajat C pada bulan Januari, dengan rendah rata-rata 11 derajat C. Rekor suhu terendah di Riyadh adalah -1 derajat C dan rekor suhu tertinggi adalah 53 derajat C.

Musik dan tarian keduanya memiliki tradisi yang kuat di Arab Saudi. Tari nasional negara itu adalah Al Ardha dan tarian pedang berdasarkan tradisi Badui. *Belly dancing* bagi perempuan juga sangat populer. Karena larangan agama, lagu biasanya dinyanyikan a cappella (tanpa instrumen) dan gitar dilarang. Selain itu, minuman beralkohol dan produk daging babi dilarang. Gaun konservatif adalah norma untuk pria dan wanita, sedangkan celana pendek dan pakaian renang tidak boleh dipakai di depan umum. Semua wanita, termasuk non-Muslim, harus memakai abayah oleh hukum. Sistem Pertahanan Nasional Arab Saudi, berada di bawah tanggung jawab Raja Arab Saudi sebagai panglima tertinggi Angkatan Bersenjata dan membentuk kebijakan militer dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Dibawah ini akan dilakukan analisis mengenai sistem pertahanan Negara Arab Saudi; bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi; dan bentuk pelibatan militer - sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri.

Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi

Berdasarkan data dan fakta, Arab Saudi adalah monarki absolut. Namun, menurut Hukum Dasar Arab Saudi yang diadopsi oleh dekrit kerajaan pada tahun 1992, raja harus mematuhi Syariah (hukum Islam) dan Alquran, sedangkan Alquran dan Sunnah dinyatakan sebagai konstitusi negara. Tidak ada partai politik atau pemilihan nasional yang diizinkan. Kritikus menganggapnya sebagai kediktatoran totaliter.

Dengan tidak adanya pemilihan nasional dan partai politik, maka politik di Arab Saudi terjadi di dua arena yang berbeda: 1) Internal keluarga kerajaan; Al Saud dan antara keluarga kerajaan; dan 2) Masyarakat Saudi lainnya. Di luar Al-Saud, partisipasi dalam proses politik terbatas pada segmen yang relatif kecil dari populasi dan mengambil bentuk konsultasi keluarga kerajaan dengan ulama, syekh suku, dan anggota keluarga komersial penting tentang keputusan besar.

Secara adat, semua pria yang sudah dewasa berhak mengajukan petisi kepada raja secara langsung melalui pertemuan suku tradisional yang disebut majlis. Dalam banyak hal, pendekatan terhadap pemerintah tidak banyak berbeda dari sistem pemerintahan suku tradisional. Identitas kesukuan tetap kuat dan di luar keluarga kerajaan, pengaruh politik sering kali ditentukan oleh afiliasi suku, dengan syekh suku mempertahankan pengaruh yang cukup besar atas acara lokal dan nasional. Seperti disebutkan sebelumnya, dalam beberapa tahun terakhir terdapat langkah-langkah terbatas untuk memperluas partisipasi politik seperti pembentukan Dewan Permusyawaratan pada awal 1990-an dan Forum Dialog Nasional pada 2003.

Aturan Al Saud menghadapi oposisi politik dari empat sumber: aktivis Islam Sunni; kritikus liberal; minoritas Syiah — khususnya di Provinsi Timur; dan lawan lama partikularistik suku dan regionalis (misalnya di Hijaz). Dari jumlah tersebut, aktivis minoritas telah menjadi ancaman paling menonjol bagi pemerintah dan dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan sejumlah insiden kekerasan di negara tersebut. Namun, protes terbuka terhadap pemerintah, meskipun damai, tidak akan ditoleransi.

Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi.

Analisis Kekuatan militer negara arab saudi menduduki peringkat ke 17 dunia pada tahun 2021. Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi mengacu pada arah politik negaranya, dengan membentuk pertahanan negara yang bersumber dari militer. Arab Saudi merupakan salah satu negara dengan persentase pengeluaran militer tertinggi di dunia, dengan menghabiskan 7,98% dari PDB-nya untuk anggaran pertahanan pada tahun 2019, yang digunakan khususnya dalam hal modernisasi alutsista.

Hal ini dapat dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran anggaran belanja pertahanan tiap negara didunia pada tahun 2019 yang rata-rata prosentase pengeluaran-nya adalah 6,383% dari PDB disetiap negara.

Militer Arab Saudi terdiri dari Angkatan Darat Kerajaan Saudi, Angkatan Udara Kerajaan Saudi, Angkatan Laut Kerajaan Saudi, Pertahanan Udara Kerajaan Saudi, Pengawal Nasional Arab Saudi, dan pasukan paramilitär berjumlah 480.000 personel aktif dan 25.000 para militer.



Angkatan bersenjata Kerajaan Saudi Arabia

Upaya Arab Saudi untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negaranya lebih memerlukan peran militer dan kebijakan pemerintah dengan kurang melibatkan warga masyarakat/sipilnya. Pengelolaan pertahanan negara Arab Saudi terbilang sangat baik dari pada negara-negara lain di wilayah Timur Tengah.

Arab Saudi adalah negara dengan persenjataan canggih dan modern paling padat di dunia yang dipasok terutama oleh AS, Prancis, dan Inggris. Bentuk Hubungan/Kerjasama/Sinergi Militer Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi Berdasarkan data fakta yang ada, Populasi Arab Saudi pada Desember 2019 berjumlah 34.218 juta jiwa.¹¹ Komposisi etnis warga Saudi adalah 90% Arab dan 10% Afro-Asia. Kebanyakan orang Saudi tinggal di Hijaz (35%), Najd (28%), dan Provinsi Timur (15%). Hejaz adalah wilayah terpadat di Arab Saudi. Hingga tahun 1970, sebagian besar orang Saudi menjalani kehidupan subsisten di provinsi pedesaan, tetapi pada paruh terakhir abad ke-20, kerajaan tersebut telah mengalami urbanisasi dengan cepat. Pada tahun 2012, sekitar 80% orang Saudi tinggal di wilayah metropolitan perkotaan - khususnya Riyadh, Jeddah, atau Dammam. Lebih dari 50% populasi Arab Saudi merupakan usia muda yang berusia di bawah 25 tahun.

Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi. Analisis bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi tidak terlalu terlihat, mengingat peran pertahanan negara menjadi tanggung jawab angkatan bersenjata (militer) yang dimiliki Arab Saudi. Selain itu, sistem pemerintahan Monarki Absolut yang berlaku di Arab Saudi menjadikan sipil kurang dilibatkan dalam sistem pertahanan negara Arab. Namun demikian, di segi penunjang keberlangsungan pemerintahan dan kemakmuran bangsa dan negaranya, sipil memberikan kontribusi nyata melalui upaya pertanian di wilayah-wilayah pedesaan.

Setelah masa 1970-an peran militer dalam kehidupan bernegara semakin berkurang. Namun demikian, kecenderungan yang ada telah memunculkan rezim otoritarian yang menempatkan relasi sipil-militer di dunia Arab cenderung masih jauh dari kondisi demokratis. Kondisi tersebut secara otomatis memangkas demokrasi sebagai mekanisme menuju kekuasaan yang sah. Fakta ini dapat kita lihat di beberapa negara Arab, seperti Saudi Arabia,

Syria, dan Mesir. Meskipun militer tidak berkuasa secara formal, namun pemerintahannya dipimpin oleh penguasa yang bersifat otoritarian dan cenderung sangat menghendaki masa kekuasaan yang tiada batas.

Bentuk Pelibatan Militer dan Sipil Dalam Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi, Dihadapkan Kemungkinan Datangnya Ancaman Dari Luar Negeri (Analisa SWOT) Berdasarkan data fakta yang ada, Departemen Pusat Statistik dan Informasi Arab memperkirakan populasi asing pada akhir 2014 sebesar 33% (10,1 juta). *CIA Factbook* memperkirakan bahwa pada 2013 warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi mencapai sekitar 21% dari populasi, yaitu India: 1,5 juta, Pakistan: 1,3 juta, Mesir: 900.000, Yaman: 800.000, Bangladesh: 400.000, Filipina: 500.000, Yordania/Palestina: 260.000, Indonesia: 250.000, Sri Lanka: 350.000, Sudan: 250.000, Suriah: 100.000 dan Turki: 80.000, dan ada sekitar 100.000 orang Barat di Arab Saudi, yang sebagian besar tinggal di kompleks atau komunitas yang terjaga keamanannya.



Angkatan bersenjata Kerajaan Saudi Arabia

Orang asing tidak dapat mengajukan izin tinggal permanen, meskipun visa Izin Tinggal Premium khusus telah tersedia pada tahun 2019. Muslim asing yang telah tinggal di kerajaan selama sepuluh tahun dapat mengajukan kewarganegaraan Saudi. Prioritas diberikan kepada pemegang gelar dalam berbagai bidang ilmiah, dan pengecualian dibuat untuk orang-orang Palestina yang dikecualikan, kecuali menikah dengan warga negara Saudi, karena instruksi

Liga Arab yang melarang negara-negara Arab memberikan kewarganegaraan kepada mereka.

Seiring dengan pertumbuhan populasi Saudi dan pendapatan ekspor minyak stagnan, tekanan untuk Saudization telah meningkat, dan pemerintah Saudi berharap untuk mengurangi jumlah warga negara asing di negara tersebut.

Arab Saudi mengusir 800.000 orang Yaman pada tahun 1990 dan 1991 serta telah membangun penghalang Saudi-Yaman dalam rangka melawan masuknya imigran gelap dan penyelundupan obat-obatan terlarang dan senjata.

Pada November 2013, Arab Saudi mengusir ribuan penduduk ilegal Ethiopia dari Kerajaan Arab Saudi. Berbagai entitas Hak Asasi Manusia telah mengkritik penanganan Arab Saudi atas masalah ini. Lebih dari 500.000 pekerja imigran tidak berdokumen - kebanyakan dari Somalia, Ethiopia, dan Yaman - telah ditahan dan dideportasi sejak 2013.

Pada 13 Agustus 2020, *Human Rights Watch* melaporkan puluhan imigran Ethiopia yang telah diusir secara paksa oleh pasukan Houthi, dengan dalih tindakan COVID-19. Para imigran ditangkap oleh penjaga Saudi ketika mereka mencoba melarikan diri dari daerah perbatasan. Investigasi yang dipimpin *The Sunday Telegraph* mengungkap kondisi imigran Afrika yang ditahan di Arab Saudi yang diduga mengandung COVID-19 mengungkapkan bahwa para imigran gelap dipukuli, disiksa, dan diserum.

Banyak imigran meninggal karena sengatan panas atau karena mencoba bunuh diri setelah dipukuli dan disiksa dengan kejam. Kondisi kehidupan para imigran serba kekurangan dan jauh dari kehidupan yang layak, penyediaan makanan dan air.

Memahami data dan fakta diatas yang ada, penulis memiliki keinginan dan harapan para pembaca memahami bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri.

Analisis, berdasarkan data fakta diatas salah satu ancaman nyata yang dihadapi pemerintah Arab Saudi adalah adanya imigran dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Arab Saudi. Peran serta/pelibatan sipil dihadapkan pada ancaman seperti itu dikelola oleh pemerintah agar warga masyarakat disekitar perbatasan menjadi informan untuk mengantisipasi tindak pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran.

Analisis SWOT Bentuk Pelibatan Militer dan Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara Arab Saudi, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri digambarkan pada matriks SWOT dibawah ini :

S.W	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
O.T	- Sumber daya alam yang berlimpah, shg pemasukan negara sangat besar - Anggaran belanja pertahanan yang besar (8% dr PDB)	- Banyaknya Imigran dengan mudah melintasi perbatasan - Tidak adanya peran sipil-militer yang jelas
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
- Dukungan USA, Prancis dan Inggris - Negara tujuan umat Islam didunia	- Pemasukan negara yang besar diarahkan dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara terutama dalam pengadaan alutsista modern. - Dukungan Negara Adikuasa diarahkan dalam mendukung kebijakan negara dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negri.	- Dukungan dan hubungan diplomatik yang baik dengan Negara adikuasa seolah membenarkan Arab Saudi dalam penanganan imigran gelap yang melanggar HAM - Memberdayakan peran sipil sebagai sumber informasi dalam mencegah masuknya imigran gelap terutama dari kawasan Afrika
KENDALA (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
- Arab spring - Kawasan regional yang selalu bergejolak	- Pemasukan negara yang besar digunakan untuk mensejahterakan warga, sehingga dapat menghindari Arab Spring yang melanda kawasan - Pembelian alutsista modern dalam rangka menimbulkan efek determinasi terhadap negara tetangga di kawasan regional	- Pengetatan dan pelarangan serta tindakan tegas terhadap pelanggar batas wilayah terutama masuknya imigran gelap dari Afrika dalam rangka menahan masuknya wabah c-19 dan pemikiran Arab Spring yang dianggap radikal dan melawan hukum negara/Kerajaan

Penutup.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran belanja pertahanan yang besar diarahkan dalam rangka modernisasi alutsista dan peningkatan kemampuan personel militer-nya.

Sistem pertahanan Negara Arab Saudi merupakan sistem pertahanan yang mengedepankan diplomasi dengan negara adikuasa dunia terutama USA, Prancis dan Inggris. Bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer-sipil dalam sistem pertahanan negara Arab Saudi belum terlihat jelas, sangat berbeda dengan Negara Indonesia, namun demikian, terlihat adanya upaya pemerintah dalam rangka pemanfaatan sipil sebagai sumber informasi (mata dan telinga pemerintah) guna mencegah masuknya imigran ilegal terutama dari negara kawasan Afrika.

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada dua pelajaran yang dapat dipetik (*lesson learned*) guna kebijakan pertahanan Negara Indonesia, yaitu; 1) Meningkatkan prosentase anggaran belanja pertahanan Negara Indonesia yang selama ini dibawah 1% dari PDB, menjadi 6,383% dari PDB (mengacu pada rata-rata pengeluaran anggaran belanja pertahanan didunia pada tahun 2019), yang dapat digunakan dalam rangka modernisasi alutsista yang berasal dari produksi dalam negri maupun luar negri; 2) Meskipun Indonesia adalah negara nonblok, di era globalisasi dan meningkatnya persaingan militer didunia serta mengantisipasi perkembangan wilayah regional Asia yang cukup signifikan, maka Indonesia perlu mencontoh Arab Saudi, khususnya dibidang kerjasama dunia, yaitu dengan meningkatkan diplomasi dan kerjasama disegala bidang, khususnya kerjasama militer dengan negara adikuasa dunia, seperti USA dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara Indonesia yang lebih baik.

**Major Cpl Adi Yusup Kesuma Jaya, B.Sc.
adalah Abituren Pendidikan Regular LX
SESKOAD TA 2021**



BENTUK SINERGISITAS ANTARA MILITER-SIPIL NEGARA JERMAN DALAM PERTAHANAN NEGARA

MAYOR KAV SAPTA RAHARJA, S.I.P.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam hal ini berarti bahwa TNI (khususnya TNI AD) sebagai bagian dari komponen bangsa, memiliki peran untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagai kekuatan/komponen utama yang didukung oleh Kepolisian Negara RI dan rakyat sebagai kekuatan/komponen cadangan dan komponen pendukung sesuai dengan keahlian masing-masing. Sebagai salah satu dari komponen bangsa dan merupakan bagian integral dari TNI yang berperan sebagai kekuatan utama dalam Sishanta, TNI AD menggelar kekuatannya menjadi Balahanwil dan Balahanpus TNI. Namun pada kenyataannya, TNI AD dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial untuk mendapatkan dukungan rakyat, dalam bentuk kemanunggalan TNI-Rakyat yang kuat dan kokoh masih terkendala di lapangan.

Dengan adanya kemanunggalan TNI-Rakyat tersebut, berarti bahwa dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan Semesta terjadi pelibatan sipil atau rakyat dalam sistem pertahanan negara, dalam hal ini berarti pula bahwa telah terjadi kerjasama yang baik dan saling memperkuat antara militer dan sipil dalam pelaksanaan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Terkait dengan sinergi peran militer dan sipil dalam sistem pertahanan semesta di NKRI, tentunya ada perbedaan apabila dihadapkan dengan bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di berbagai negara. Sehubungan hal tersebut dalam rangka melihat perbandingan bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil diberbagai negara, akan dibahas bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di negara Jerman.

Dari latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi persoalan yang perlu segera dipecahkan. Pertama, bagaimana sistem pertahanan negara di negara Jerman? kedua; bagaimana bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman? ketiga, bagaimana bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman, terutama ketika dihadapkan dengan kemungkinan datangnya ancaman dari luar negeri?.

Dari permasalahan tersebut penulis mencoba merumuskan masalah "Bagaimana bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di negara Jerman?".

Pentingnya tulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di negara Jerman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yang berdasarkan pada hasil pengamatan di lapangan dan studi pustakaan.

Nilai guna penulisan esai ini, agar pembaca dapat mengetahui bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di negara Jerman. Maksud tulisan ini adalah untuk memberikan perbandingan bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil. Sedangkan tujuan penulisan ini adalah untuk memetik pelajaran dari strategi bentuk sinergi/kerjasama militer dan sipil di negara Jerman. Ruang lingkup dalam penulisan ini meliputi pendahuluan, pembahasan dan penutup dengan pembatasan di negara Jerman.

Pembahasan

Jerman adalah negara berbentuk federasi di Eropa Barat, dengan ibu kota Berlin. Jerman terletak di Eropa bagian tengah dan berbatasan langsung dengan sembilan negara. Di sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luksemburg dan Perancis. Di sebelah selatan berbatasan dengan Swiss dan Austria. Di sebelah timur berbatasan dengan Ceko dan Polandia dan di sebelah utara berbatasan dengan Denmark. Negara ini mempunyai luas total 357021 km² (137847 sq mi) terdiri dari luas daratan 349223 km² (134836 sq mi) dan luas lautan 7798 km² (3011 sq mi). Jerman merupakan negara terluas ketujuh di Eropa dan ke-62 di dunia.

Secara umum, topografi Jerman adalah dataran rendah di utara dan wilayah berbukit-bukit di bagian selatan. Puncak tertingginya adalah Zugspitze setinggi 2.962 meter dpl yang merupakan bagian dari sistem Pegunungan Alpen di perbatasan dengan Austria. Titik terendah Jerman adalah Wilstermarsch (rawa Wilster), dekat Steinburg di bagian utara, yaitu -3,54 meter dpl. Kelompok etnik di Jerman yaitu orang Jerman, Eropa lainnya, orang Asia Barat, orang Turki, orang Arab, Asia lainnya,

Afrika dan orang Amerika. Kemudian untuk agama di Jerman yaitu Kristen (59,3%), tidak beragama (34,4%), islam (5,5%) dan agama lain (0,8%).



Peta Wilayah Negara Jerman

Sistem Pertahanan Negara Jerman

Bundeswehr adalah angkatan bersenjata Republik Federal Jerman dan administrasi juga pengadaan otoritas sipil. Negara Jerman tidak diizinkan untuk mempertahankan angkatan bersenjata karena konstitusi Jerman menyatakan bahwa masalah pertahanan negara menjadi tanggung jawab pemerintah federal. *Bundeswehr* dibagi menjadi beberapa bagian militer (angkatan bersenjata atau *Streitkräfte*) dan bagian sipil dengan pemerintahan angkatan bersenjata (*Wehrverwaltung*). Bagian kekuatan pertahanan federal Jerman terdiri dari Angkatan Darat Jerman, Angkatan Laut Jerman, Angkatan Udara Jerman, Dukungan Layanan Medis, Layanan Medis Bersama serta Layanan Cyber dan Informasi Komando Luar Angkasa. Pada tanggal 31 Juli 2019, *Bundeswehr* memiliki jumlah personel sekitar 182.832 tentara aktif dan 28.250 personel cadangan juga didukung dengan anggaran militer sebesar € 47,32 miliar.⁴ Adapun sistem pertahanan negara Jerman dilakukan dalam bentuk civil defense atau perlindungan sipil sebagai upaya untuk melindungi warga negara

dari serangan militer dan bencana alam. Adapun prinsip yang digunakan adalah prinsip operasi darurat mencakup pencegahan, mitigasi, persiapan, tanggapan atau evakuasi dan pemulihan darurat.



Angkatan Bersenjata Jerman (Streitkräfte)

Konsep strategi negara Jerman tersebut dituangkan dalam bentuk pertama, kebijakan kerjasama multilateral di Eropa dengan semboyan “*Germany Never Again and Germany Never Alone*”. Evolusi penting terkait kebijakan keamanan adalah bahwa “*the expand concept of security covers not only questions about conflict prevention, defense, disarmament and arms controls, but also economic, ecological, and social issue as well as human right* (Schollgen: 2008: 73).” Selain itu, berikut dua hal fundamental dan paling mendasar terkait evolusi kebijakan keamanan Jerman di Eropa yaitu Jerman “tidak lagi (never again)” dan “tidak sendirian lagi (never alone)” dalam mengatasi masalah keamanan Eropa di masa kini dan ke depannya (Schollgen, 2008: 74). Dalam konteks ini, Jerman nampaknya tidak ingin lagi mengulang sejarah peperangan seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan menekankan pada filosofi keamanan bersama di kawasan Eropa pasca perang dingin (Schollgen, 2008: 74).

Kedua, Kebijakan intergrasi dan perluasan keanggotaan Uni Eropa. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa dan negara tersebut menerapkan prinsip demokrasi, hukum, penghormatan HAM dan menjalankan peraturan perundungan UE (*Acquis Communautaires*).

Ketiga, kebijakan kerjasama multilateral di NATO. Jerman ketika masih berstatus sebagai Republik Federal Jerman/ RFJ mulai bergabung menjadi anggota NATO tahun 1955. Hingga hari ini Jerman tetap menjaga hubungan dengan NATO di Eropa. Kebijakan Jerman di NATO mengalami kemajuan seiring dengan perkembangan kelembagaan Uni Eropa di Eropa. Meskipun kerjasama multilateral di NATO menjadi prioritas kedua setelah Uni Eropa, Jerman tetap menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota aliansi dalam berbagai bidang. Sejauh ini, fokus kerjasama Jerman adalah memperkuat integrasi Uni Eropa menjadi lebih kuat dan stabil.

Bentuk Hubungan/Kerjasama/Sinergi Militer Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara Jerman

Bentuk hubungan/kerjasama/sinergi militer sipil negara Jerman dilakukan secara profesional seiring dengan berjalannya demokrasi sesuai dengan konsep model negara barat melalui penekanan supremasi sipil atas militer.

Jerman yang di masa lalu dikenal sebagai pemilik kekuatan militer yang tangguh sekaligus sebagai negara penganut paham militer pun terpaksa atau dipaksa membubarkan tentaranya. Berkat langkah tersebut, Jerman berhasil menyejajarkan diri dengan negara-negara demokrasi yang telah maju lebih dulu dan menjadi negara di mana supremasi sipil mengedepan. Peran militer Jerman (Bundeswehr) dijelaskan dalam Konstitusi Jerman (Pasal 87a) mutlak hanya sebagai defensif. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Federal pada tahun 1994 istilah pertahanan telah ditetapkan untuk tidak hanya mencakup perlindungan perbatasan Jerman tetapi juga reaksi krisis dan pencegahan konflik atau lebih luas seperti menjaga keamanan Jerman di mana saja di dunia. Ini mengharuskan Bundeswehr untuk mengambil bagian dalam operasi di luar perbatasan Jerman sebagai bagian dari NATO atau Uni Eropa dan dimandatkan oleh PBB. Karenanya, Jerman berusaha mempengaruhi peran militer dalam masyarakat khususnya yang terkait upaya pembentukan negara hukum dan lingkaran inti kepemimpinan.

Hubungan militer dan sipil Jerman digambarkan dengan tercapainya tingkat profesionalisme militer yang handal namun juga mengetahui batasan kemampuan profesional yang dimilikinya, tunduknya militer pada pimpinan sipil sebagai pembuat keputusan, khususnya dalam kebijakan luar negeri dan militer (pertahanan), mengakui dan menerima kepemimpinan (sipil) dalam bidang kemampuan profesionalnya. Namun dalam hal ini militer juga mempunyai otonomi, oleh karenanya, campur tangan militer menjadi minimal dalam politik namun juga militer tidak dicampuri oleh politik.

Bentuk Pelibatan Militer dan Sipil dalam Sistem Pertahanan Negara Jerman

Bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman dihadapkan dengan adanya ancaman serangan dari luar dilakukan melalui konsep pertahanan sipil yang mendorong warganya mengumpulkan persediaan makanan dan air yang cukup untuk bertahan selama bencana besar atau serangan bersenjata (negara berstatus darurat). Selain itu, sistem peringatan dini, perlindungan bangunan yang lebih baik serta cakupan pelayanan kesehatan yang lebih luas untuk pertahanan dan keamanan. Warga Jerman harus memberikan dukungan penuh kepada angkatan bersenjata. Selain itu, pengintegrasian sipil dan militer dalam strategi sistem pertahanan mengacu pada upaya memperkuat peran Kementerian Pertahanan Federal atau *Bundesministerium der Verteidigung* sebagai representasi institusi sipil dan militer dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan. Perkuatan peran ini menyangkut pendayagunaan kekuatan SDM, sistem, peran dan kemampuan organisasi mengenai masalah pertahanan. Hal ini dapat dilakukan dengan pendefinisan yang jelas mengenai peran, perilaku, kegiatan dan tanggungjawab masing-masing komponen yang ada sehingga anggota mampu meningkatkan kinerjanya dengan menguasai atau memiliki bakat dan keahlian sesuai bidang kerjanya, mampu mengembangkan diri, bekerjasama dalam tim kerja sehingga memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan kerjasama sipil-militer untuk kepentingan bersama sebagai bagian dari fungsi negara (*state security*), dalam menyediakan sistem pertahanan yang tangguh

sebagai barang publik (*public goods*) harus dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Dalam pemahaman pertahanan negara sebagai barang publik, pemerintah senantiasa dituntut untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan (*liberty*) dan keamanan (*security*). Dengan kata lain, kerjasama sipil-militer harus dilihat dalam konteks kerjasama secara keseluruhan (*comprehensive security*) keseimbangan antara kepentingan keamanan negara (*state security*) di satu pihak dan keamanan insani (*human security*) di lain pihak sebagai aktivitas milik bersama baik dalam perspektif organisasi maupun administrasi publik. Fungsi kolaboratif ini memiliki beberapa kesamaan yang didapat yaitu adanya aktivitas *stakeholders* anggota organisasi untuk saling membantu dan saling memahami aktivitas masing - masing serta adanya kerjasama yang dilakukan antar organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Melihat pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman dengan menggunakan analisis SWOT mencakup kekuatan (*strengths*) situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan memenuhi keuntungan, kelemahan (*weaknesses*) yaitu situasi dan faktor-faktor internal yang bersifat negatif yang menghambat mencapai atau mampu melampaui pencapaian, peluang (*opportunities*) yaitu situasi dan faktor-faktor luar yang bersifat positif yang membantu mencapai atau mampu melampaui pencapaian dan kendala/ancaman (*threats*) yaitu faktor-faktor luar yang bersifat negatif yang dapat mengakibatkan kegagalan. Dalam analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan eksternal merupakan daftar dari prioritas faktor lingkungan baik eksternal maupun internal dari pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman. Kekuatan (*strengths*) dari pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman adalah adanya supremasi sipil atas militer di Jerman dan sejarah perang dunia di masa lalu sebagai pembelajaran di masa depan. Kemudian untuk kelemahan yaitu adanya gerakan neo militerisme berupa paham fasisme dengan gaya baru yang dapat mengancam dan membahayakan supremasi sipil militer. Sedangkan peluang dari pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman adalah adanya kerjasama dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa serta partisipasi dalam pemelihara perdamaian dunia.

Sedangkan kendala atau ancaman yaitu adanya pergeseran bentuk dan spektrum ancaman yang dihadapi Jerman sehingga menyulitkan untuk diantisipasi.

Penutup

Sesuai dengan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pertahanan negara Jerman dilakukan oleh pemerintah federal Jerman melalui sistem *civil defense* atau perlindungan sipil sebagai upaya untuk melindungi warga negara dari serangan militer dan bencana alam. Konsep strategi negara tersebut dituangkan dalam bentuk kebijakan kerjasama multilateral di Eropa dengan semboyan "*Germany Never Again and Germany Never Alone*", kebijakan intergrasi dan perluasan keanggotaan Uni Eropa dan kebijakan kerjasama multilateral di NATO. Kemudian untuk bentuk hubungan/ kerja-sama/sinergi militer sipil negara Jerman dilakukan secara profesional seiring dengan berjalannya demokrasi sesuai dengan konsep model negara barat melalui penekanan supremasi sipil atas militer. Hubungan militer dan sipil Jerman digambarkan dengan tercapainya tingkat profesionalisme militer yang handal namun juga mengetahui batasan kemampuan profesional yang dimilikinya, tunduknya militer pada pimpinan sipil sebagai pembuat keputusan khususnya dalam kebijakan luar negeri dan militer (pertahanan), mengakui dan menerima kepemimpinan (sipil) dalam bidang kemampuan profesionalnya, namun dalam hal ini militer juga mempunyai otonomi. Oleh karenanya, campur tangan militer menjadi minimal dalam politik namun juga militer tidak dicampuri oleh politik. Sedangkan bentuk pelibatan militer dan sipil dalam sistem pertahanan negara Jerman dihadapkan dengan adanya ancaman serangan dari luar dilakukan melalui konsep pertahanan sipil yang mendorong warganya mengumpulkan persediaan makanan dan air yang cukup untuk bertahan selama bencana besar atau serangan bersenjata (negara berstatus darurat). Selain itu, sistem peringatan dini, perlindungan bangunan yang lebih baik serta cakupan pelayanan kesehatan yang lebih luas untuk pertahanan dan keamanan. Warga Jerman harus memberikan dukungan penuh kepada angkatan bersenjata. Faktor internal dan eksternal terdiri dari kekuatan (*strengths*) yaitu adanya supremasi sipil atas militer di Jerman dan sejarah perang

dunia di masa lalu sebagai pembelajaran di masa depan, kelemahan yaitu adanya gerakan neo militerisme berupa paham fasisme dengan gaya baru yang dapat mengancam dan membahayakan supremasi sipil militer, peluang yaitu adanya kerjasama dalam keanggotaan NATO dan Uni Eropa serta partisipasi dalam pemelihara perdamaian dunia serta kendala atau ancaman yaitu adanya pergeseran bentuk dan spektrum ancaman yang dihadapi Jerman sehingga menyulitkan untuk diantisipasi.

Dari pembahasan tersebut, penulis dapat mengambil pembelajaran pelibatan sipil dan militer dalam sistem pertahanan negara Jerman dilakukan secara seimbang antara kebebasan (*liberty*) dan keamanan (*security*) sehingga kerjasama sipil-militer terbentuk secara keseluruhan (*comprehensive security*) antara kepentingan keamanan negara (*state security*) di satu pihak dan keamanan insani (*human security*). Sedangkan dari pembahasan tersebut di atas, penulis memberikan saran antara lain ; pertama. agar Pemerintah dalam pelibatan sipil dan militer dalam sistem pertahanan negara harus dapat berkomitmen khususnya legislatif dan eksekutif selaku pembuat keputusan untuk memperkuat supremasi sipil dan militer dalam pertahanan negara dalam menjalankan peran dan fungsi militer dan nirmiliter demi kepentingan pertahanan negara; kedua. TNI selaku pemangku kebijakan pertahanan negara harus dapat mewadahi dalam menyiapkan pertahanan kewilayahan sebagai ujung tombak dalam menangkal gangguan dan ancaman yang mungkin timbul di era yang serba modern ini; Ketiga. Aparat kewilayahan harus di bekali ilmu yang mumpuni terutama dari segi Intelejen dimana aparat kewilayahan merupakan ujung tombak informasi dan pertahanan dari TNI serta perlu adanya penambahan sarana dan prasarana serta kesejahteraan bagi aparat yang bertugas di wilayah terutama yang bertugas di wilayah perbatasan. Akhir kata demikian essay ini dibuat, penulis merasa masih terdapat kekurangan dalam penulisannya dan masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan masukan pasti diperlukan guna perbaikan tulisan ini ke depan.

**Mayor Kav Sapta Raharja, S.I.P. adalah
Abituren Pendidikan Regular LX SESKOAD
TA 2021**



PERTEMPURAN CARACAS : KAJIAN PERTEMPURAN KEMERDEKAAN VENEZUELA

KOMPOL A. MUKTI SURYA A. S., S.H., S.I.K., M.SI.

Pendahuluan

Perang Kemerdekaan Venezuela (1810-1823) adalah salah satu perang yang terjadi di benua Amerika yang terjadi antara awal abad kesembilan belas, ketika gerakan kemerdekaan di Amerika Latin berperang melawan pemerintahan kekaisaran Spanyol. Upaya revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai sejak negeri tersebut ditaklukkan Napoleon pada medio 1800-an. Situasi itu lalu dimanfaatkan oleh berbagai negara di Amerika Latin untuk melawan. Sementara di Venezuela, tercatat pada April 1810, mereka secara *de facto* menyatakan merdeka dan segera mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh Simon Bolivar.

Berdasarkan uraian tersebut maka esai ini akan mengidentifikasi pokok-pokok persoalan yaitu; Pertama, Apa latar belakang sejarah terjadinya perang di negara tersebut? Kedua, Bagaimana perang yang terjadi di negara tersebut dihadapkan dengan teori perang?, Ketiga, Bagaimana pergerakan pasukan yang terlibat dalam perang tersebut?, Keempat, Bagaimana Taktik perang yang digunakan? Kelima, Dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut? Keenam, Pelajaran yang dapat diambil untuk masa yang akan datang?

Berdasarkan pokok persoalan tersebut maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana terjadinya pertempuran kemerdekaan Venezuela dalam melawan kolonialisme Spanyol.

Pembahasan

Latar belakang sejarah terjadinya perang.

Peperangan Venezuela melawan kolonialisme Spanyol dilatarbelakangi oleh penjajahan yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol pada masa kolonialisme Eropa di wilayah Amerika Selatan, bermula dari invasi Perancis ke Spanyol pada tahun 1808, sehingga menyebabkan runtuhnya Monarki Spanyol. Sebagian besar rakyat Spanyol tidak menerima pemerintahan Joseph Bonaparte, yang ditempatkan di atas takhta Spanyol oleh saudaranya, Kaisar Napoleon Bonaparte dari Prancis.

Revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai pada 1810 ketika gubernur Spanyol di Venezuela digulingkan dari kursi kekuasaannya. Gerakan kemerdekaan di Venezuela menambah masalah bagi Kerajaan Spanyol, yang di saat bersamaan terlibat Perang Napoleon di Eropa. Pada 5 Juli 1811, tujuh dari sepuluh provinsi mendeklarasikan kemerdekaan di Venezuela yang memanfaatkan kondisi Spanyol yang sedang berperang dengan Prancis

di Eropa sekaligus melemahkan kondisi Spanyol di wilayah Venezuela.



Lukisan Perang Kemerdekaan Venezuela 1887
oleh Martin Tovar

Bagaimana perang yang terjadi di negara tersebut dihadapkan dengan teori perang.

Mengacu pada teori perang sebagaimana yang disebutkan oleh Clausewitz, bahwa dalam melakukan perang haruslah dilakukan dengan keseluruhan (total) kemampuan dan sarana yang ada, sebab bila tidak, maka kemenangan tak akan tercapai. Dimana dalam sebuah pertempuran penggunaan kekuatan secara penuh (*Offensif*) merupakan keharusan. Dikorelasikan dengan teori tersebut, pertempuran yang dipimpin oleh Simon Bolívar dan pasukan Royalis yang dipimpin oleh Marshall Lapangan Spanyol, *Miguel de la Torre*. Kemenangan Bolívar di Carabobo menyebabkan kemerdekaan Venezuela dan pembentukan Republik Gran Columbia membebaskan berbagai wilayah pesisir sungai Cartagena. Termasuk memenangi "Pertempuran Cúcuta" melawan armada gabungan antara Spanyol dan royalis yang jumlahnya lebih besar, dengan strategi Total War atau mengerahkan semua kekuatan yang dimiliki dalam melawan pasukan yang lebih besar.

Bagaimana pergerakan Pasukan yang terlibat dalam perang tersebut.

Pada tanggal 19 April 1810 dewan administratif Caracas memimpin gerakan yang sukses untuk menggulingkan Gubernur Spanyol yang dipimpin oleh Jenderal, Vicente

Emparán, kemudian sebuah junta (dewan direktur) yang didirikan di Caracas, dan segera provinsi-provinsi Venezuela lainnya mengikutinya. Gema dari tindakan kemerdekaan ini dapat langsung dirasakan di seluruh Venezuela.

Di seluruh Venezuela, kota-kota besar dan kecil memutuskan untuk memihak gerakan yang berbasis di Caracas, hingga memunculkan Gerakan revolusi di hampir semua wilayah di Venezuela. Junta Caracas kemudian menyerukan Kongres provinsi Venezuela untuk mendirikan sebuah pemerintahan untuk daerah, kemudian dipimpin oleh Simon Bolívar (seorang pemimpin kemerdekaan Venezuela) dan kaum republikan lainnya melanjutkan perlawanan di Caracas, dengan mengorganisir gerakan gerilya di pedalaman negara itu.

Pada tahun 1813 Bolívar bergabung dengan tentara yang disebut sebagai New Granada setelah memenangkan serangkaian pertempuran, kemudian Simon Bolívar menerima persetujuan Kongres New Granada untuk memimpin pasukan pembebasan ke wilayah Caracas, pada saat yang sama, pejuang Venezuela yang lain bernama Santiago Marino menyerbu dari timur laut dalam kampanye yang terorganisir secara independen. Kedua pasukan dengan cepat mengalahkan pasukan kerajaan Spanyol dalam berbagai pertempuran, seperti Alto de los Godos hingga Simon Bolívar memasuki Caracas pada tanggal 6 Agustus 1813 setelah mengalahkan spanyol yang kemudian memproklamirkan kemerdekaanya.

Taktik perang yang digunakan.

Taktik perang yang digunakan oleh pasukan revolusi Venezuela yang dipimpin oleh Simon Bolívar menggunakan taktik perang gerilya seperti Pertempuran Alto de los Godos yang merupakan pertempuran yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1813 di Maturín, Venezuela, di wilayah New Granada yang menghasilkan kemenangan melawan pasukan Spanyol yang dipimpin oleh Domingo de Monteverde, dimana strategi gerilya cukup efektif mengalahkan Spanyol.

Setelah membuat "*Manifesto Cartagena*", ia melanjutkan misinya dengan memanfaatkan kepiawaianya dalam berpidato. Alhasil, kaum patriot, rakyat miskin, dan para budak bersimpati dengannya, hingga semua orang yang bersimpati dan anti terhadap Spanyol mau dan ikut angkat senjata untuk Venezuela melalui perang gerilya. Perang gerilya yang dilakukan oleh Simon Bolivar dilakukan secara sembunyi sembunyi, penuh kecepatan, sabotase dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif, kemudian Simon Bolivar menyebarkan propaganda dan melakukan pidato ke wilayah-wilayah yang merupakan kantong-kantong anti spanyol, prinsip dasar dari perang gerilya yang digunakan oleh Bolivar adalah tidak ada pertempuran, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar, sebelum dilaksanakannya perang besar-besaran sehingga pihak musuh tidak siap dalam melawan gerilyawan Venezuela.

Dampak yang ditimbulkan akibat perang tersebut

Pasca perang besar-besaran yang terjadi di wilayah Caracas sebagaimana uraian sebelumnya, tahun-tahun berikutnya peperangan terus terjadi untuk mendapatkan kemerdekaan Venezuela, kekalahan dan kemenangan silih berganti, namun Simon Bolivar sebagai pimpinan Venezuela tetap bertekad untuk merebut kembali tanah airnya, sehingga Pada 1819, Simon Bolivar memimpin tentara dengan peralatan seadanya untuk menyeberangi wilayah Andes, demi menyerang pasukan Spanyol di Kolombia.

Di sana, ia dan pasukannya berhasil memenangkan sebuah pertempuran, yang dikenal dengan Battle of Boyace, pada 7 Agustus 1819. Venezuela akhirnya dapat dimerdekakan pada 1821, disusul dengan Ekuador pada 1822, tiga tahun kemudian, tepatnya pada Juni 1821, Bolivar bersama pasukan Republik akhirnya baru benar-benar mengusir habis pasukan Spanyol di Caracas dan di beberapa daerah kecil di Venezuela.

Setelah itu giliran Ekuador yang dibebaskan, kemudian Peru dua tahun berselang. Cita-cita Bolivar membebaskan seluruh Amerika Selatan dari kolonialisme Spanyol pun perlahan terwujud.

Pasca kekalahan beruntun yang dialami, Spanyol mengirim armada pada tahun 1823 untuk merebut kembali negara itu tetapi dikalahkan di Pertempuran Danau Maracaibo. Pada tahun-tahun berikutnya pasukan Venezuela, sebagai bagian dari tentara Gran Kolombia, terus berkampanye di bawah kepemimpinan Bolívar untuk membebaskan bagian selatan New Granada di wilayah Venezuela dan Ekuador. Setelah ini tercapai, Bolivar melalui pidatonya melanjutkan perjuangannya melawan Spanyol sampai ke wilayah Peru dan Bolivia hingga perjuangan meletus di hampir semua jajahan Spanyol di wilayah Amerika Selatan.

Pasca perang yang akhirnya mengakhiri Kolonialisme Spanyol Simon Bolivar menjadi orang yang sangat ambisius untuk membangun sebuah federasi yang terdiri dari negara-negara baru merdeka di Amerika Selatan. Akhirnya terbentuk federasi antara Venezuela, Kolombia, dan Ekuador, diberi nama Republik Kolombia Raya, dengan Simon Bolivar sebagai presidennya. Namun federasi yang dibuatnya tidak berjalan dengan mulus, Venezuela dan Ekuador memisahkan diri dari republik Kolombia Raya dan menjadikan Simon Bolivar sebagai Presiden Venezuela Pertama.

Pelajaran yang dapat diambil

Pelajaran yang dapat diambil oleh pimpinan TNI AD dimasa yang akan datang salah satunya adalah kepemimpinan Simon Bolivar dalam menginspirasi rakyatnya untuk mau dan mengikuti dirinya dalam melawan penjajahan Spanyol melalui kepiawaianya dalam berpidato. Alhasil, kaum patriot, rakyat miskin, dan para budak bersimpati dengannya, hingga semua orang yang bersimpati dan anti terhadap Spanyol mau dan ikut angkat senjata untuk Venezuela melalui perang gerilya. Hal tersebut merupakan sebuah pelajaran yang dapat diambil oleh pemimpin saat ini dan masa mendatang dalam membangun sebuah kekuatan sistem pertahanan semesta, dimana

kondisi saat ini justru dalam konteks Indonesia sendiri sedang terjadi krisis kepemimpinan, mengingat sistem pertahanan Indonesia yang mengacu pada Sistem pertahanan Semesta dengan rakyat sebagai komponen cadangan yang memerlukan motivasi pemimpin dalam menggerakkan masyarakat, bahkan Simon Bolivar bukan saja hanya menginspirasi masyarakat Venezuela dalam merebut kemerdekaan dari Spanyol, tapi hampir semua wilayah di Amerika Selatan yang merdeka pasca revolusi dan perang besar-besaran di wilayah Caracas Venezuela.

Selain kepemimpinan, sebuah pembelajaran perang gerilya yang digunakan oleh Bolivar adalah tidak hanya mengacu pada pertempuran, Bolivar tidak akan mengizinkan pasukannya berperang jika hanya melaksanakan pertempuran kecil, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar.



Keterangan :

-  Pertempuran Maracaibo
-  Pertempuran Carabobo
-  Pertempuran Caracas
-  Dampak Pertempuran Venezuela

Wilayah Pertempuran Caracas Venezuela.

Penutup

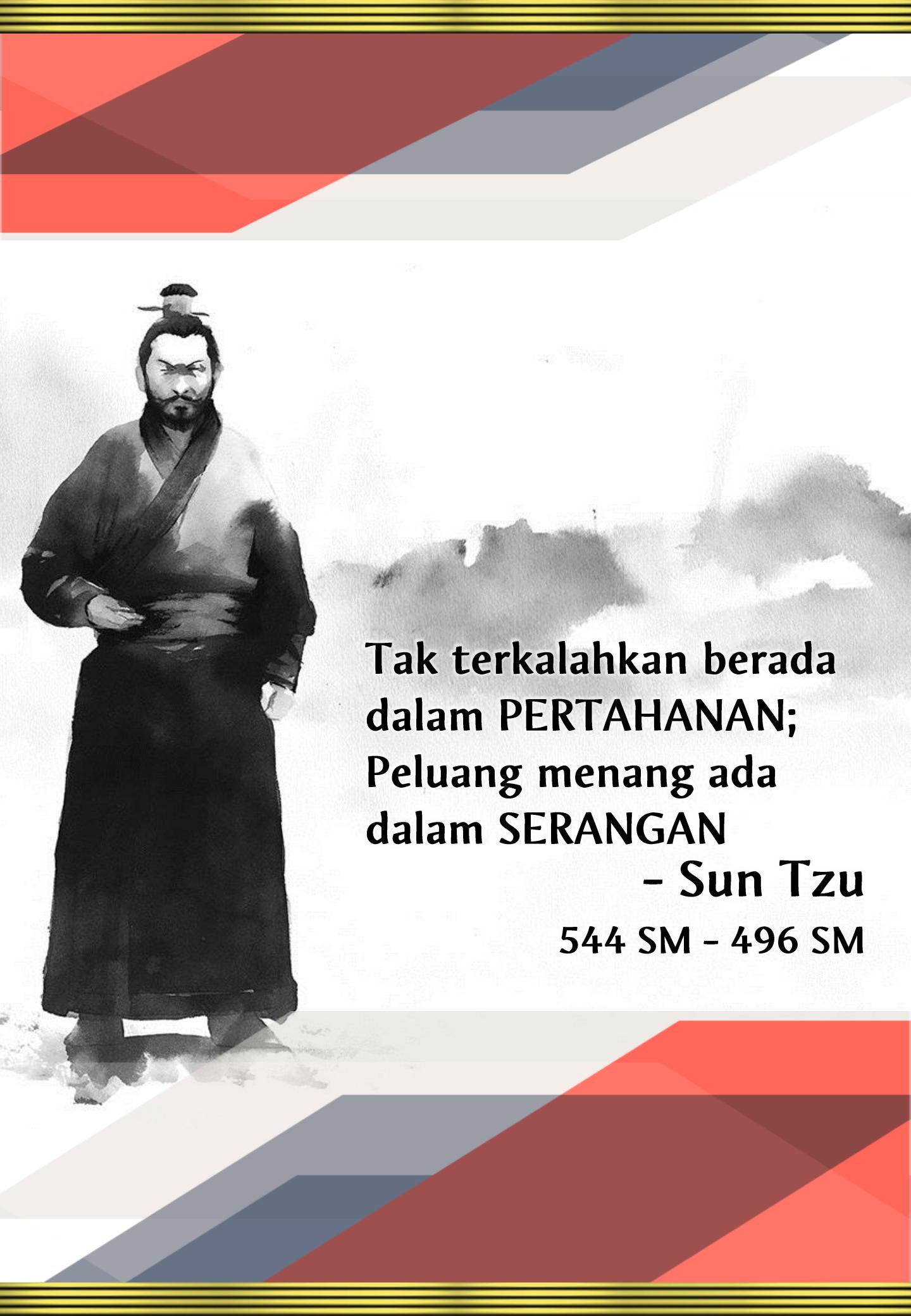
Perang Kemerdekaan Venezuela (1810-1823) adalah salah satu perang yang terjadi di benua Amerika yang terjadi antara awal abad kesembilan belas, ketika gerakan kemerdekaan di Amerika Latin berperang melawan pemerintahan kekaisaran Spanyol, Upaya revolusi melawan kekuasaan Spanyol di Venezuela dimulai sejak negeri tersebut ditaklukkan Napoleon pada medio 1800-an. Situasi tersebut lalu dimanfaatkan oleh berbagai negara di Amerika Latin untuk melawan. Sementara di Venezuela, tercatat pada April 1810, mereka secara de facto menyatakan merdeka dan segera mendirikan pemerintahan yang dipimpin oleh Simon Bolivar

Di seluruh Venezuela, kota-kota besar dan kecil memutuskan untuk memihak gerakan yang berbasis di Caracas, hingga memunculkan Gerakan revolusi di hampir semua wilayah di Venezuela. Junta Caracas kemudian menyerukan Kongres provinsi Venezuela untuk mendirikan sebuah pemerintahan untuk daerah, kemudian dipimpin oleh Simon Bolívar (seorang pemimpin kemerdekaan Venezuela) dan kaum republikan lainnya melanjutkan perlawanan di Caracas, dengan mengorganisir gerakan gerilya di pedalaman negara tersebut.

Selain kepemimpinan, sebuah pembelajaran perang gerilya yang digunakan oleh Bolivar adalah tidak hanya mengacu pada pertempuran, Bolivar tidak akan mengizinkan pasukannya jika hanya melaksanakan pertempuran kecil, konflik bersenjata atau pertempuran kecil yang akan dilaksanakan kecuali yakin perang akan dimenangkan. Itu artinya kemampuan 'gerakan bawah tanah', tipuan, atau kejutan merupakan elemen mendasar dalam menerapkan strategi gerilya.

Kompol A. Mukti Surya A. S., S.H., S.I.K., M.Si. adalah Abituren Pendidikan Regular LXI SESKOAD TA 2021





**Tak terkalahkan berada
dalam PERTAHANAN;
Peluang menang ada
dalam SERANGAN**

- Sun Tzu

544 SM - 496 SM



ISSN 2086-9312



9772086931295